

**PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA
DI KABUPATEN JEMBER (PENDEKATAN
ANALYTIC HIERARCHY PROCESS/AHP)**

S K R I P S I

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Jember**



Oleh:

AGUNG SUDILAKSONO
NIM. 000810101347

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI
2005**

JUDUL SKRIPSI

PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN JEMBER
(PENDEKATAN ANALYTIC HIERARCHY PROCESS/AHP)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

N a m a : AGUNG SUDILAKSONO

N. I. M. : 000810101347

J u r u s a n : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

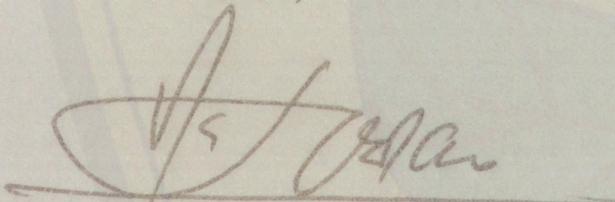
telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal :

23 JULI 2005

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar S a r j a n a dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

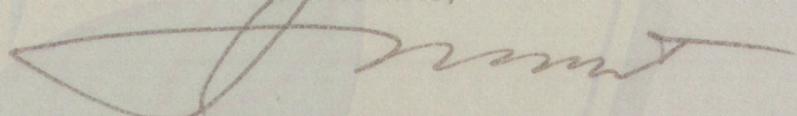
Ketua,



Drs. Bambang Yudono, MM

NIP. 130 355 409

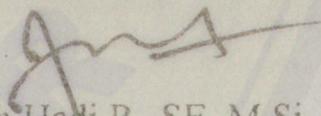
Sekretaris,



Drs. Sunlip Wibisono, M.Kes

NIP. 131 624 478

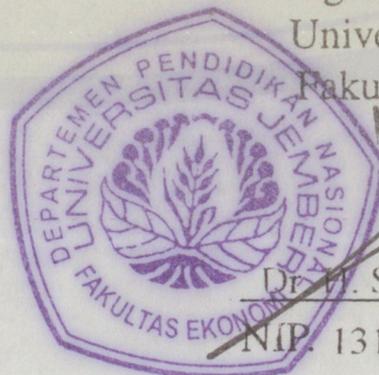
Anggota,



Teguh Hadi P., SE, M.Si

NIP. 132 092 300

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,



Dr. H. Surwedi, MM

NIP. 131 276 658



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Mahasiswa : Agung Sudilaksono
N I M : 000810101347
Jurusan : Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA DI
KABUPATEN JEMBER (PENDEKATAN
ANALYTIC HERARCHY PROCESS/AHP)

Menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan dan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jember, 23 Juli 2005

Yang menyatakan,

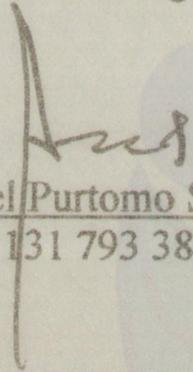


(Agung Sudilaksono)

TANDA PERSETUJUAN

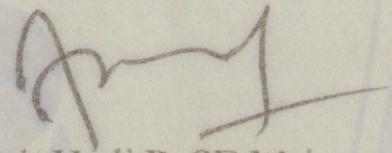
Judul Skripsi : Pengembangan Sektor Pariwisata Di Kabupaten Jember
(Pendekatan *Analytic Hierarchy Process/AHP*)
Nama Mahasiswa : Agung Sudilaksono
NIM : 000810101347
Jurusan : Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan
Konsentrasi : Ekonomi Perencanaan Dan Pembangunan Regional
Disetujui Tanggal : 13 Juli 2005

Pembimbing I,



Dr. Rafael Purতোমো S., Msi
NIP. 131 793 384

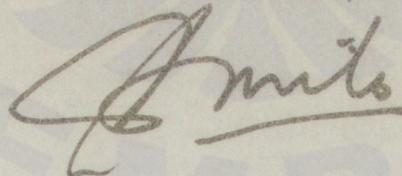
Pembimbing II,



Teguh Hadi P., SE, Msi
NIP. 132 092 300

Mengetahui;

Ketua Jurusan,



Drs. J. Sugiarto, SU
NIP. 130 610 494

PERSEMBAHAN

Dengan tulus, kupersembahkan karya kecilku ini kepada:

1. Kedua orang tuaku “Bpk. SUDIARSO” dan “Ibu SRI HASTUTI”, yang aku sayangi dan aku hormati, yang telah tulus ikhlas berdoa dan berkorban dalam setiap langkahku (Semoga ALLAH melimpahkan rahmat dan kasih sayang kepada mereka).
2. Adikku “Dyah”, terima kasih kuucapkan atas semua dorongan dan bantuan yang telah kau berikan.
3. Pendamping hidupku kelak “Ningsih”, atas semua dorongan, perhatian, pengertian, kasih sayang dan kritikan yang memberiku semangat untuk menikmati hidup ini dalam suka maupun duka.
4. Almamater Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang takkan pernah kulupakan.

MOTTO

“Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat ALLAH. Ingatlah, hanya dengan mengingat kepada ALLAH-lah hati menjadi tentram”.

(QS. Ar Ra’d: 28).

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu (pasti) ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah (urusan yang lain) dengan sungguh-sungguh. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”.

(QS. Alam Nasyrah: 6-8).

Akal dan belajar itu seperti raga dan jiwa
Tanpa raga, jiwa adalah udara hampa
Tanpa jiwa, raga adalah kerangka tanpa makan
(Kahlil Gibran)

Belajar dari kesalahan di masa lampau adalah baik.
Tetapi alangkah lebih baik jika belajar untuk tidak berbuat kesalahan
baik di masa kini maupun di masa yang akan datang
(Dawy)

ABSTRAKSI

Pengembangan Sektor Pariwisata Di Kabupaten Jember

(Pendekatan *Analytic Hierarchy Process/AHP*)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi wisata manakah yang layak untuk dikembangkan dan dapat diterapkan serta yang diidentifikasi memiliki potensi yang cukup besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember yaitu wisata alam, wisata buatan, wisata budaya, dan wisata minat khusus.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Analytic Hierarchy Process* (AHP). Metode ini dapat menangkap persepsi manusia yang bersifat intangible, menggunakan data primer yang diperoleh dari responden yang *expert* dalam hal pengembangan sektor pariwisata dan memahami kondisi riil di Kabupaten Jember secara menyeluruh dan mendalam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi wisata alam merupakan potensi wisata yang menjadi prioritas tertinggi di bandingkan dengan potensi wisata lainnya dengan bobot nilai 0,5027. Penentuan jenis potensi wisata tersebut dilakukan dengan menggunakan kriteria-kriteria yang dianggap cukup representatif dalam menentukan jenis potensi wisata.

Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa prioritas utama pengembangan sektor pariwisata adalah dengan mengembangkan jenis wisata alam, sedangkan kriteria utama yang harus dipertimbangkan adalah kriteria ekonomi.

Kata kunci: sektor pariwisata, analytic hierarchy process

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil Aalamin,

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran ALLAH swt, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Penulisan skripsi dengan judul “Pengembangan Sektor Pariwisata Di Kabupaten Jember (Pendekatan *Analityc Hierarchy Process/AHP*)” ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi guna memperoleh gelar kesarjanaan Strata I pada jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya dorongan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, karena itu sewajarnya bagi penulis untuk menyatakan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak langsung atau tidak langsung telah membantu penyusunan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bpk. Dr. H. Sarwedi, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember beserta staff.
2. Bpk. Dr. Rafael Purতোমো S.,MSi, selaku dosen Pembimbing I, yang telah banyak memberi waktu, bimbingan, petunjuk, dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bpk. Teguh Hadi P., SE, MSi, selaku dosen Pembimbing II, atas segala saran, nasehat, sharing, dan kesabaran dalam membimbing penulis hingga akhir penyusunan.
4. Bpk. Drs. J. Sugiarto, SU, selaku Ketua Jurusan IESP, atas nasehat dan masukannya.
5. Para Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang telah memberikan ilmunya selama ini.
6. Segenap Kepala Instansi beserta staf, yang telah memberikan ijin, data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses penyusunan skripsi ini.

7. Bpk. dan Ibu Mul, serta para penghuni “Wisma Antiti (Sedih”, Yuyut, Diky (thanx for “Satria”nya), Zeri “Wong Solo”, Robby “Pa Ndut” (thanx for “Sigma AE”, enteni aku nang Kediri), sahabat kkaribku Dedy “Parjo” (terimakasih atas petunjuknya yang membuat aku beerada di Jember), serta teman senasib dan sepenanggungan lainnya.
 8. Para penggemar dan pengaguunku di “Wisma Putri Bunga”, serta Pak Sur dan Bu Win, terima kasih atas makanan, nasehat dan tempat “mengeluhnya”.
 9. Om Harjo dan Budhe Harini serta adikku Ika di Situbondo, terima kasih atas tempat pelariannya.
 10. Sahabat-sahabatku “*The Three Musketeers*”: Resa “Kiuya” dan Gito (semoga sukses dan bahagia menyertai kalian), The AHP Group’s: Bang Fuad, Mas Ma’sum, Mba Deli dan Mba Indah (Mba In, akhirnya..... aku bisa).
 11. Rekan-rekanku IESP Ganjil 2000, semoga kita bisa bertemu lagi di waktu yang akan datang.
 12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas segala bantuannya.
- Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat dan berguna bagi banyak pihak.

Jember, Juli 2005

Penulis



DAFTAR ISI

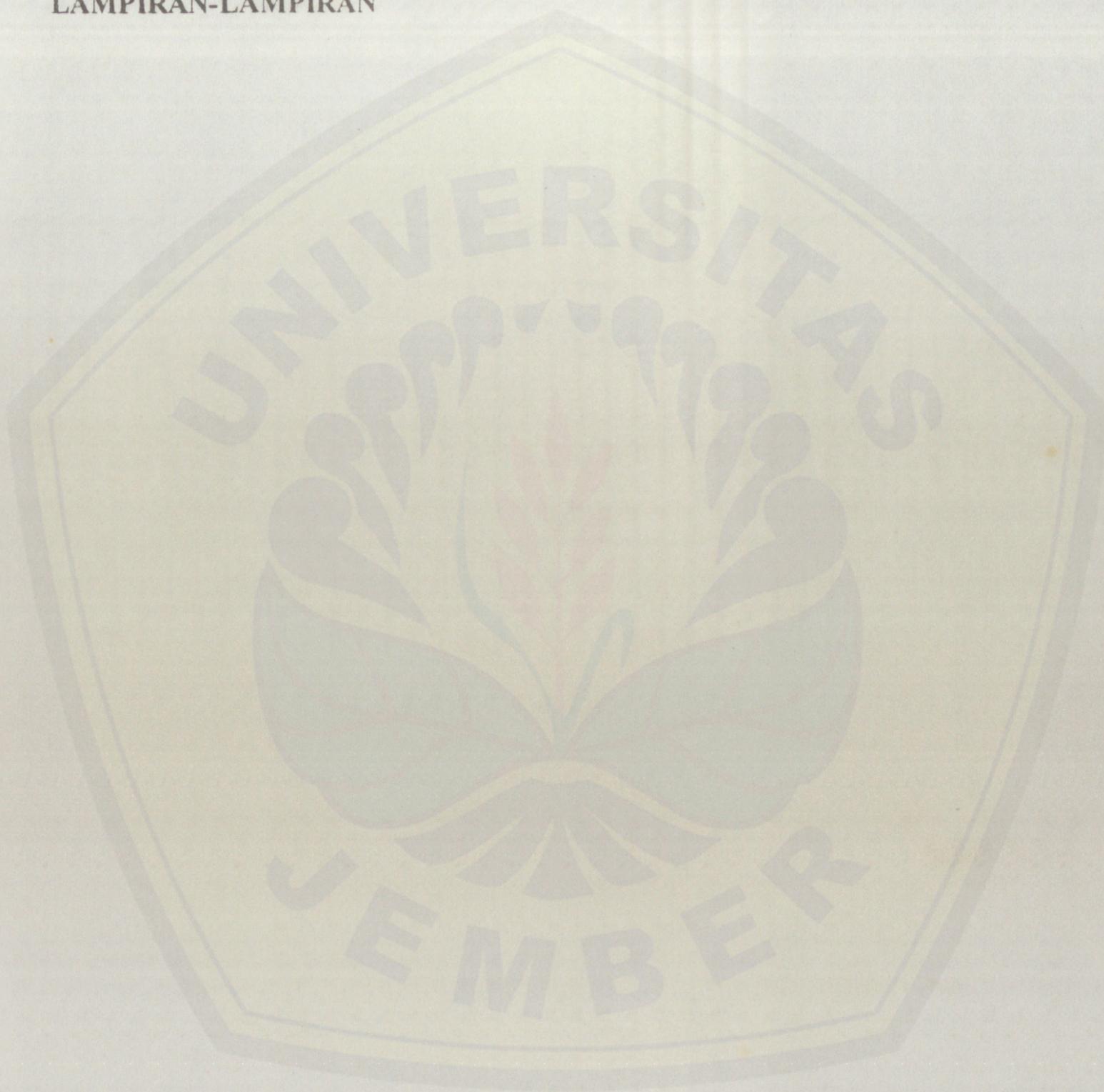
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAKSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Pokok Permasalahan	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya	8
2.2 Landasan Teori	8
III. METODE PENELITIAN	
3.1 Rancangan Penelitian	29
3.2 Metode Pengambilan Data	30
3.3 Metode Analisis Data	30
3.4 Definisi Operasional	35
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum	36
4.2 Analisis Data	42
4.3 Pembahasan Hasil Perhitungan	48

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	52
5.2 Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Skala Preferensi AHP.....	25
2.2	Indeks Random.....	28
4.1	Perbandingan Struktur Ekonomi Kabupaten Jember Tahun 2001-2002 Dari PBRB Atas Dasar Harga Berlaku (Persen).....	39
4.2	Nama Obyek Wisata, Lokasi, Jarak dan Jenis Obyek Wisata.....	40
4.3	Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik Maupun Manca- negara Di Kabupaten Jember Tahun 2000-2003.....	41
4.4	Prioritas Penentu Jenis Potensi Wisata.....	45
4.5	Prioritas Jenis Potensi Wisata Untuk Setiap Kriteria.....	46
4.6	Prioritas Jenis Potensi Wisata Berdasarkan Pertimbangan Seluruh Kriteria.....	48

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 :** Hasil Sintesis Prioritas Pengembangan Jenis IPotensi Pariwisata Di Kabupaten Jember
- Lampiran 2 :** Pengembangan Jenis Potensi Pariwisata Untuk SSetiap Kriteria
- Lampiran 3 :** Hasil Sintesis Global Prioritas Pengembangan Jenis Potensi Pariwisata Berdasarkan Pertimbangan Seluruh Kriteria
- Lampiran 4 :** Contoh Kuesioner Penelitian
- Lampiran 5 :** Sampel Hasil Perhitungan Data
- Lampiran 6 :** Peta Pariwisata Kabupaten Jember

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang dapat menyebabkan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat dalam jangka panjang (Sukirno, 1985:13). Pembangunan dapat disinyalir sebagai usaha untuk memperbesar pendapatan per kapita dan menaikkan produktivitas per kapita dengan jalan menambah peralatan modal dan menambah *skill* (kemampuan) dan masyarakatnya (Djojohadikusumo, 1995:39). Pembangunan ekonomi sangat diperlukan oleh suatu negara karena dengan adanya pembangunan ekonomi akan berdampak positif pada meningkatnya kekayaan, konsumsi, serta tabungan masyarakat (Irawan dan Suparmoko, 1990:7). Pada prinsipnya, pembangunan ekonomi tersebut diharapkan dapat menciptakan suatu pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat.

Proses pertumbuhan ekonomi yang berfokus pada proses peningkatan produksi barang dan jasa melalui kegiatan ekonomi masyarakat, selalu mengupayakan dinamika alokasi faktor-faktor produksi yang efektif dan efisien, agar dapat digunakan seoptimal mungkin bagi masyarakat. Pengalokasian faktor-faktor produksi yang ada selalu terkait dengan penggunaan sumber-sumber daya yang ada, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya alam.

Memasuki era globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa dampak semakin ketatnya persaingan di segala bidang, baik di sektor industri maupun di sektor jasa. Sektor pariwisata sebagai salah satu sektor penghasil devisa terbesar, perlu dikembangkan serta dikelola dengan terencana. Industri pariwisata merupakan peluang yang tidak dapat dilepaskan begitu saja. Pariwisata telah tumbuh menjadi sebuah industri yang sangat menguntungkan dan memiliki potensi serta prospek yang sangat cerah bagi pembangunan (Spillane, 1998:19).

Pada pembangunan nasional suatu bangsa, segenap modal dan potensi yang terdapat dalam negara tersebut harus dimanfaatkan semaksimal mungkin

dengan disertai kebijaksanaan serta langkah-langkah untuk membantu perkembangan dan meningkatkan kemampuan yang lebih besar bagi seluruh aspek masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Keberhasilan pembangunan dalam bidang industri pariwisata tergantung pada peranan pengambil keputusan dalam memutuskan suatu kebijakan demi kemajuan sektor pariwisata.

Alasan utama pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata baik secara lokal, regional atau ruang lingkup regional suatu negara, sangat erat kaitannya dengan pembangunan perekonomian daerah-daerah atau negara tersebut. Artinya pengembangan kepariwisataan suatu daerah tujuan wisata akan selalu diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi rakyat banyak. Suatu daerah tujuan wisata yang industri pariwisatanya berkembang dengan baik, dengan sendirinya akan memberikan dampak positif bagi daerah itu, karena dapat memberikan dan menciptakan lapangan kerja yang luas bagi penduduk setempat.

Fenomena ekonomi dalam pariwisata mempunyai aspek yang cukup luas. Secara makro, kepariwisataan merupakan alat untuk mencapai tujuan-tujuan umum ekonomi. Ada dua aspek dampak kepariwisataan terhadap ekonomi yakni keuntungan-keuntungan dalam negeri dan kepariwisataan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan umum ekonomi.

Keuntungan-keuntungan dalam negeri dari kepariwisataan antara lain:

- a. Dorongan untuk memperluas lapangan kerja
- b. Pasaran baru untuk hasil-hasil produksi tertentu
- c. Efek penggandaan (*multiplier effect*)
- d. Mendorong penanaman modal asing
- e. Memajukan pengembangan daerah
- f. Mendistribusikan kembali pendapatan nasional.

Sedangkan kepariwisataan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan umum ekonomi, antara lain mencakup:

- a. Suatu alat pembangunan daerah
- b. Kepariwisataan mengurangi pengangguran
- c. Kepariwisataan sebagai ekspor yang tidak kelihatan (*invisible export*)

- d. Kepariwisataaan dan perbendaharaan negara
- e. Kepariwisataaan dan penanaman modal.

Di samping pengaruh positif dari hasil pengembangan kepariwisataan, kegiatan kepariwisataan juga dapat menimbulkan efek negatif yang apabila tidak dibenahi dapat membahayakan kehidupan sosial. Pengaruh negatif tersebut di antaranya:

- a. Pertumbuhan industri pariwisata yang cepat tanpa terkendali dapat mengakibatkan dan menciptakan permintaan yang berlebihan terhadap barang-barang bangunan dan konstruksi untuk keperluan fasilitas industri pariwisata
- b. Kemungkinan adanya pencemaran potensi pariwisata menjadi semakin besar, sehingga terjadi pengrusakan terhadap cagar alam, obyek wisata, tempat-tempat bersejarah dan lingkungan yang dapat menimbulkan polusi
- c. Dapat menimbulkan komersialisasi budaya untuk pariwisata yang akan merusak nilai-nilai budaya dengan kehilangan sifat yang asli dan dapat melenyapkan kepribadian yang selama ini dibanggakan
- d. Pengaruh negatif terhadap kehidupan sosial dan ekonomi karena kegiatan pariwisata dapat pula timbul sebagai akibat kurang tepatnya perhitungan dalam perencanaan.

Pada pertumbuhan pariwisata, keuntungan yang diperoleh harus diperhitungkan secara hati-hati. Masalah yang ditimbulkan tidak hanya dapat merusak lingkungan, tetapi juga mempengaruhi kehidupan sosial budaya daerah tujuan wisata yang dikunjungi.

Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki pola persebaran spasial dan geografis yang luas dengan potensi daerah yang bersifat heterogen, prioritas pembangunan ekonomi terutama perekonomian suatu daerah merupakan suatu hal yang amat penting. Pembangunan ekonomi pada garis besarnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi masalah pembangunan.

Indonesia berpeluang untuk meningkatkan bisnis di bidang kepariwisataan, karena pariwisata memberikan sumbangan bagi devisa negara yang akan dapat dipakai untuk membantu kegiatan perekonomian. Selain itu, pariwisata bermanfaat besar bagi penyediaan lapangan kerja dan berusaha,

menumbuhkan kebudayaan dan kesenian. Komitmen terhadap pengembangan pariwisata menuntut adanya serangkaian kebijaksanaan untuk mendukung pariwisata. Pariwisata dikembangkan tidak semata-mata sebagai sektor tunggal melainkan terintegrasi dengan berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi Indonesia.

Pelaksanaan kegiatan kepariwisataan menuntut adanya berbagai jaminan agar lingkungan baik sosial, politik, ekonomi dan budaya senantiasa berada dalam kondisi bersih dan terjamin keamanannya. Karena pada hakikatnya pariwisata adalah sebuah industri yang rentan akan gangguan keamanan. Meskipun ekonomi memang faktor paling menentukan kegiatan pariwisata, akan tetapi faktor stabilitas politik dan keamanan juga memiliki dampak pada kegiatan pariwisata.

Kunjungan wisatawan ke Indonesia dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Peningkatan demi peningkatan tersebut terus berlangsung sebagai akibat bertambah baiknya keadaan di dalam negeri. Selain faktor keamanan yang semakin mantap, keadaan ekonomi yang semakin stabil dan semakin majunya teknologi informasi, serta tersedianya sarana transportasi yang memadai, dan adanya kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada wisatawan untuk masuk ke Indonesia telah membuat wisatawan semakin banyak berkunjung.

Pada akhir PJP I terjadi peningkatan jumlah kunjungan. Pada tahun 1989 jumlah kunjungan sebesar 1.626.000 orang, setahun kemudian meningkat menjadi 2.117.600 orang atau meningkat 33,95%. Kemudian pada tahun 1991 terjadi lagi peningkatan menjadi 2.569.900 orang dengan peningkatan sebesar 18 %, dan tahun 1992 meningkat lagi menjadi 3.060.200 orang dengan peningkatan sebesar 19,1%.

Kondisi pariwisata di Indonesia sejak adanya krisis moneter pada tahun 1997 sangatlah memprihatinkan. Keadaan ini diperparah dengan adanya peristiwa peledakan bom di Legian Bali pada bulan Oktober 2002 lalu, meledaknya bom di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada bulan April 2003, serta ditambah dengan mewabahnya virus SARS dan virus flu burung yang melanda kawasan Asia.

Setelah peristiwa-peristiwa tersebut, industri pariwisata sangat menurun kegiatannya karena kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik sangat minim. Penundaan dan pembatalan kedatangan ke Indonesia untuk perjalanan wisata, bahkan untuk kepentingan bisnis pun tak kenal henti. Pelaku usaha wisata di sektor hotel, restoran, penerbangan dan industri pendukung lainnya diselimuti ketidakpastiaan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia pada tahun 2002 sebesar 5.033.400 wisatawan atau turun sekitar 2,33% dari tahun 2001 sebesar 5.153.600 wisatawan. Hal ini menyebabkan penurunan pendapatan negara di sektor pariwisata sebesar 1,85% menjadi 5,3 milyar dollar AS pada tahun 2002, lebih rendah dari tahun 2001 sebesar 5,4 milyar dollar AS (Pandia, 2003).

Dalam rangka pengembangan sektor kepariwisataan di Propinsi Jawa Timur, Pemerintah Propinsi Jawa Timur telah menetapkan perencanaan pengembangan kepariwisataan di Jawa Timur yang secara teknis operasional dituangkan ke dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP). Rencana pengembangan tersebut ditetapkan dalam bentuk Perda Propinsi Jawa Timur No. 16 Tahun 1998, yang disusun untuk jangka waktu 1999/2000 sampai dengan 2014/2015 (Asmuji, 2003). Strategi pengembangan pariwisata di dalam RIPP mencakup beberapa hal, yaitu strategi pengembangan pasar, strategi pengembangan produk, strategi pengembangan pemasaran dan strategi pengembangan investasi.

Kabupaten Jember berada di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur merupakan daerah potensial di bidang pariwisata. Secara geografis, Kabupaten Jember yang berbatasan dengan Samudra Indonesia di sebelah selatan mempunyai banyak obyek wisata pantai yang indah. Begitu juga dengan pegunungan yang membentang di sebelah utara dan timur menjadikan Kabupaten Jember banyak obyek wisata alam seperti air terjun. Areal perkebunan juga merupakan lokasi wisata yang menarik untuk dikunjungi.

Kabupaten Jember sebagai salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Timur memiliki potensi daerah tujuan wisata yang sangat besar. Potensi-potensi wisata tersebut terdiri dari wisata alam, wisata buatan, wisata budaya serta wisata minat

khusus. Menurut Dinas Pariwisata dan Kesenian Kabupaten Jember, saat ini di wilayah Kabupaten Jember ada sekitar 36 potensi wisata yang tersebar di berbagai kecamatan. Dari potensi-potensi tersebut hanya sekitar 19 daerah tujuan wisata saja yang telah dikelola dan dikembangkan dengan baik.

Pada tahun 2002, sektor pariwisata di Kabupaten Jember memperoleh masukan sebesar Rp 381.264.500,- atau meningkat sekitar 18,92% dari tahun 2001 sebesar Rp 309.125.500,-. Sedangkan dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Jember, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara, mengalami perubahan yang cukup berarti. Pada tahun 2001, jumlah wisatawan yang berkunjung ke daerah-daerah tujuan wisata di Jember berjumlah 370.642 wisatawan. Tetapi pada tahun 2002 mengalami penurunan sebesar 3,43% menjadi 357.935 wisatawan. Hal ini disebabkan oleh berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, seperti terjadinya ledakan bom di Bali, serta mewabahnya virus SARS. Baru pada tahun 2003 jumlah kunjungan mengalami peningkatan menjadi 387.337 wisatawan, yang ditimbulkan oleh membaiknya kondisi di Indonesia (Disparda Kab. Jember 2003).

Pengembangan dan pembangunan sektor kepariwisataan di Kabupaten Jember memerlukan biaya yang tidak sedikit. Perbaikan jalan menuju obyek wisata, pembangunan penginapan atau hotel, sarana transportasi dan komunikasi mutlak dilakukan. Oleh karena itu, pengembangan tersebut memerlukan perencanaan yang matang dan terkendali.

1.2 Pokok Permasalahan

Pengembangan sektor pariwisata perlu dipertimbangkan dalam segala aspek. Hal ini disebabkan sektor pariwisata tidak berdiri sendiri tetapi berkaitan erat dengan sektor-sektor lain seperti sektor ekonomi, sosial dan budaya, serta keamanan. Pembangunan pariwisata juga ditentukan oleh segi pengembangan potensi wisata yang dilakukan oleh pemerintah. Ketersediaannya infrastruktur yang memadai juga menentukan pengembangan potensi wisata.

Pengembangan sektor-sektor kepariwisataan tersebut, di samping akan menunjang program pariwisata daerah Kabupaten Jember, juga diharapkan dapat

memberikan keuntungan dan pemasukan pendapatan daerah Kabupaten Jember yang dapat meningkatkan dan mendukung upaya pertumbuhan ekonomi.

Dari uraian tersebut di atas maka dapat diambil suatu rumusan masalah yaitu: *“Dari beberapa potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Jember, jenis potensi wisata manakah yang seharusnya dikembangkan di Kabupaten Jember?”*.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis potensi wisata manakah yang layak untuk dikembangkan dan dapat diterapkan dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat berguna untuk:

1. Memberi masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam menentukan prioritas kebijakan yang dapat menunjang pembangunan daerah, terutama kebijakan yang tepat di sektor pariwisata.
2. Memberi masukan kepada pihak non pemerintah dalam mengambil keputusan untuk penanaman modal atau investasi di sektor pariwisata Kabupaten Jember.
3. Referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan oleh Asmuji (2003), tentang “Perkembangan Industri Pariwisata dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Jawa Timur”, menyatakan bahwa pola kebijaksanaan pengembangan kepariwisataan di Jawa Timur diarahkan pada penetapan prioritas pengembangan objek wisata dan daya tarik wisata yang berbasis pada wisata alam, wisata laut dan pantai, serta wisata *agro adventure*.

Pada penelitian tersebut menyatakan bahwa pengembangan atau pengusahaan objek dan daya tarik wisata sebenarnya dapat dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu: 1) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam (air terjun, laut dan pantai); 2) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya (religius); dan 3) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus (petualangan dan perkebunan).

Berdasarkan pengelompokan dari 3 jenis pengusahaan objek dan daya tarik wisata, pengusahaan objek wisata alam dan wisata minat khusus mendapat prioritas yang paling besar. Sedangkan strategi pengembangan kepariwisataan di Jawa Timur ditetapkan dalam bentuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Bias Teori Pembangunan

Setiap teori pembangunan memiliki asumsi spesifik sesuai dengan format dan sejarah dimana teori itu dibangun. Oleh sebab itu tidak semua teori pembangunan dapat diterapkan begitu saja di wilayah lain yang memiliki format sosial dan sejarah budaya yang berbeda. Teori pusat pertumbuhan dan teori investasi dari Harrod Domar, ternyata memberikan hasil yang tidak memuaskan. Teori pembangunan struktural yang dari analisis historis cukup logik, ternyata dalam praktek hampir tidak mungkin untuk diterapkan. Asumsi-asumsi yang

digunakan dalam membangun teori struktural hampir tidak dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia.

Teori-teori pembangunan diatas menghasilkan konsep pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi, sehingga apa yang diharapkan terjadinya trickle down proses tidak terjadi khususnya di negara berkembang. Paradigma terakhir muncul, paradigma pembangunan manusia dimana manusia ditempatkan pada urutan pertama. Mengutamakan manusia dalam pembangunan (*Putting People First*), merupakan suatu keharusan yang menghasilkan konsep pemberdayaan masyarakat yang menyangkut pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community-based development*).

Pembangunan menurut konsep pemberdayaan masyarakat ini, menurut Kartasasmita (1996) diartikan sebagai sebagai upaya menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakatnya untuk menikmati kehidupan kreatif, sehat dan berumur panjang. Paradigma pembangunan manusia ini sebagai konsep yang holistik dengan 4 (empat) unsur penting menyangkut: peningkatan produktivitas, pemerataan kesempatan, kesinambungan pembangunan serta pemberdayaan manusia.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomo yang merangkum nilai-nilai sosial. Menurut Chambers, konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat "*people-centered, participatory, empowering and sustainable*". Konsep ini mencoba melepaskan diri dari perangkap "*zero-sum game dan trade off*". Ini bertitik tolak pada pandangan bahwa dengan pemerataan tercipta landasan yang lebih luas untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, seperti apa yang dikatakan Fei dan Ranis, "*the pattern of growth is just as important as the rate of growth*", yakni bukan vertikal menghasilkan "*trickle down*", seperti yang terbukti tidak berhasil, tetapi yang bersifat horizontal (*horizontal flows*), yakni "*broaly based, employment intensive and not compartmentalized*" (Jhingan, 217: 2003).

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan obyek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan

subyek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep tersebut, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut:

1. Upaya itu harus terarah (*targetted*) atau pemihakan, yaitu ditujukan kepada yang memerlukan dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalah dan sesuai kebutuhannya.
2. Program ini harus mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan masyarakat yang menjadi sasaran. Selain itu sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya.
3. Menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas kalau penanganannya dilakukan secara individu. Karena itu pendekatan kelompok lebih efektif dan dilihat dari penggunaan sumberdaya juga lebih efisien.

2.2.2 Strategi dan Ancangan Baru Pembangunan Nasional dan Daerah

Bahwa pertumbuhan ekonomi yang diupayakan dari berbagai program yang dilaksanakan pada proses pembangunan yang telah berlangsung sebelumnya ternyata tidak dengan sendirinya dapat menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi yang dihadapi. Asumsi *trickle down effect* yang melekat pada paradigma pertumbuhan (*growth paradigm*) yang diharapkan secara otomatis menyertai pertumbuhan tidak muncul, dan asumsi bahwa setiap pelaku ekonomi mempunyai produktivitas dan akses terhadap faktor produksi yang sama tidak pernah terjadi sehingga menyebabkan berbagai kesenjangan di masyarakat makin melebar.

Sejalan dengan perputaran waktu, banyak orang makin menyadari bahwa pembangunan tidak hanya ingin meraih pertumbuhan semata, namun aspek pemerataan mulai mengedepan untuk mendapatkan perhatian yang lebih besar. Di samping itu kesadaran akan pentingnya peningkatan peran serta daerah dan masyarakat juga makin mewarnai diskursus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Munculnya pemikiran bahwa pertumbuhan harus beriringan dengan pembagian hasil-hasil pembangunan secara lebih merata, yang dikenal dengan *redistribution with growth* diyakini akan lebih menjamin keberlanjutan pembangunan itu sendiri. Sejalan dengan hal ini, peningkatan peran serta daerah dan masyarakat menyebabkan program-program pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan (*sustainable*) dan terhindar dari *policy fallacy* - sebagai akibat dari kesalahan pendeterminasian kebutuhan masyarakat.

Melalui Garis-garis Besar Haluan Negara 1993 yang merupakan tahun pertama PJP II, logi pemerataan dikedepankan dalam proses pembangunan nasional, dibandingkan dua logi lainnya yaitu pertumbuhan dan stabilitas. Pada era ini *political will* pemerintah, khususnya yang berada di lembaga-lembaga perencanaan pembangunan telah secara nyata terlihat untuk memperbaiki strategi pembangunan yang akan ditempuhnya.

Sebagai koreksi maka harus diadopsi strategi pembangunan baru yang memadukan pertumbuhan dan pemerataan, yang pada dasarnya mempunyai tiga arah yaitu 1) *pemihakan dan pemberdayaan masyarakat*, 2) *pemberian otonomi dan pendelegasian wewenang* dalam pengelolaan pembangunan di daerah, dan 3) modernisasi melalui *penajaman dan pemantapan arah dari perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat* (Sumodin:ngrat, 1996).

Pemberdayaan yang bermakna kekuatan dari dalam, namun dapat diperkuat dengan unsur-unsur penguatan yang diserap dari luar. Dengan demikian maka pemberdayaan ditujukan untuk melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan serta memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan (Kartasasmita, 1996c). Sebagai konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial, pemberdayaan masyarakat mencerminkan paradigma baru pembangunan, yaitu yang bersifat *people-centered, participatory, empowering*, dan *sustainable* seperti dikemukakan Robert Chamber.

Konsep pemberdayaan ini tidak mempertentangkan pertumbuhan dengan pemerataan sebagaimana dikatakan Donald Erown, namun mencoba untuk melepaskan diri dari perangkap *zero-sum game* dan *trade off*. Konsep ini bertitik tolak dari pandangan bahwa dengan pemerataan akan tercipta landasan yang lebih

luas untuk pertumbuhan dan akan menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan demikian maka dalam proses pembangunan tidak hanya semata-mata laju pertumbuhan yang perlu dicermati, tetapi juga pola pertumbuhannya itu sendiri, yaitu pertumbuhan yang menurut istilah Gustav Ranis adalah pertumbuhan yang tepat (*the right kind of growth*) yakni bukan yang vertikal menghasilkan “tetesan ke bawah” – yang telah terbukti tidak berhasil, melainkan bersifat horisontal – berbasis luas dan menciptakan kesempatan kerja dan tidak terkotak-kotak.

Dalam kerangka ini, Kartasmita (1996c) mengajukan tiga sisi upaya pemberdayaan masyarakat, yaitu (1) menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang (*enabling*), (2) memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*), dan (3) melindungi dengan jalan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang sehingga yang lemah tidak menjadi bertambah lemah karena kekurangberdayaan menghadapi yang kuat.

Pada masyarakat yang masih tertinggal, pemihakan dan pemberdayaan masyarakat tidak cukup hanya dengan meningkatkan produktivitasnya, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan memberikan suntikan modal saja, melainkan harus dijamin adanya kerjasama yang erat di antara yang kuat dengan yang lemah secara berkesinambungan. Sementara untuk masyarakat yang sudah lebih maju, pemberdayaan diarahkan pada penciptaan iklim yang menunjang peluang untuk tetap maju serta sekaligus menanamkan pengertian bahwa suatu saat wajib untuk membantu yang lemah untuk lebih maju.

Dalam kerangka pembangunan nasional, upaya peningkatan pemerataan dan penanggulangan kemiskinan ditempatkan dalam bingkai proses perubahan struktur (*structural transformation*) yang sedang berlangsung dalam masyarakat sebagai hasil dari pembangunan. Sebagai proses perubahan/transformasi, pembangunan pada dasarnya akan membawa perubahan dalam proses alokasi sumber-sumber ekonomi, proses distribusi manfaat, dan proses akumulasi yang menyebabkan peningkatan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan.

Dalam kerangka pembangunan daerah, proses tersebut diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat (*capacity building*) melalui penciptaan

akumulasi modal yang bersumber dari surplus yang dihasilkan dan pada gilirannya dapat menciptakan pendapatan yang dinikmati oleh rakyat; atau dengan kata lain bahwa proses transformasi ini harus digerakkan oleh masyarakat sendiri. Dengan demikian maka proses pemupukan modal harus muncul dari dalam masyarakat sendiri, oleh masyarakat, dan untuk dinikmati masyarakat sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara alamiah. Sebagai konsekuensi dari pendekatan ini maka setiap anggota masyarakat disyaratkan berperan serta dalam proses pembangunan, mempunyai kemampuan sama, dan bertindak rasional.

Keragaman kondisi dan potensi masyarakat dan kelembagaan antardaerah harus direkognisi. Oleh sebab itu maka pendelegasian wewenang atau desentralisasi diupayakan kepada tingkatan pemerintahan serendah mungkin, khususnya daerah otonom dengan tetap berlandaskan pada Wawasan Nusantara.

Pendelegasian wewenang dalam rangka pemberian otonomi daerah dilaksanakan dengan meningkatkan kemampuan aparat dan kemampuan masyarakat di daerah itu sendiri. Dalam hubungan ini pemerintah daerah harus mengambil peranan yang lebih besar karena merekalah yang paling mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakatnya. Hal ini mensyaratkan adanya kemampuan aparatur Pemerintah Daerah Tingkat II yang andal di semua unsur, baik unsur perencanaan oleh Bappeda Tingkat II, unsur pelaksanaan oleh Kantor Dinas/kantor wilayah dan instansi terkait, unsur pelayanan administrasi oleh Setwilda Tingkat II, maupun unsur pengendalian dan pengawasan oleh Inspektorat Wilayah.

Otonomi daerah dengan demikian harus ditempatkan dalam kerangka untuk memberi kewenangan kepada daerah untuk mengkoordinasikan dan memadukan perencanaan, pelaksanaan pengendalian, dan pengawasan berbagai program pembangunannya sendiri. Dalam kerangka ini maka peningkatan peran serta masyarakat juga harus dilaksanakan dengan mendayagunakan mekanisme perencanaan di tingkat desa melalui musyawarah masyarakat desa yang terhi, pun dalam wadah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan mekanisme perencanaan di tingkat kecamatan melalui forum diskusi Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP).

Sejalan dengan hal tersebut, aparat pemerintah daerah sebagai **pembina** dan **pendamping** harus mampu menjamin terselenggaranya tugas pemerintahan dan pembangunan yang efisien dan efektif yang **tanggap terhadap aspirasi rakyat** dan mampu **melayani, mengayomi, menggerakkan dan menghargai prakarsa dan peran serta aktif** rakyat dalam pembangunan serta makin mencurahkan perhatiannya pada upaya-upaya pemerataan. Dengan demikian dalam menghadapi masalah-masalah keadilan sosial dan kepentingan rakyat banyak, pemerintah tidak boleh netral tetapi harus berpihak.

Dalam bidang fiskal dan moneter, khususnya pengalokasian anggaran pembangunan yang biasanya dijalankan dan dikendalikan oleh pemerintah pusat, harus dapat mendorong proses peningkatan efisiensi alokasi sumber daya ekonomi dengan mengarahkan aliran sumber daya tersebut untuk mengatasi kesenjangan, baik antardaerah, antarsektor, maupun antargolongan pendapatan. Dengan demikian maka peningkatan pangsa desentralisasi harus segera dilakukan menggantikan dekonsentrasi.

Untuk menjamin terciptanya pemerataan maka harus penentuan prioritas dan pengalokasian pembangunan harus memperhatikan keseimbangan antardaerah sehingga dapat mengurangi kesenjangan yang tercipta dalam proses pembangunan sebelumnya.

2.2.3 Alokasi Sumber-sumber Ekonomi dalam Perspektif Teori

Salah satu teori atau paham yang pertama kali membahas pengalokasian sumber-sumber ekonomi adalah teori Neo Klasik. Di bawah pemikiran Heckscher dan Ohlin, teori spesialisasi dalam pembagian kerja yang didasarkan pada meningkatnya produktivitas faktor produksi (pada masa klasik), berubah menjadi teori pembagian kerja atas dasar proporsi faktor. Pada teori proporsi faktor (*factor proportion*), dikehendaki bahwa suatu negara atau suatu daerah harus mempertimbangkan proporsi faktor yang dimiliki dalam memilih barang-barang dan jasa-jasa yang akan dihasilkannya.

Perbedaan kelimpahan faktor-faktor antar daerah merupakan suatu justifikasi, bahwa daerah-daerah seharusnya membangun fungsi produksi

berdasarkan kelimpahan faktor produksi yang dimiliki sendiri. Ajaran ini (Heckscher dan Ohlin) dikenal dengan spesialisasi pembagian kerja antar daerah atau *regional division of labour*. Oleh karena wilayah internasional dipandang sebagai kelanjutan konsep wilayah daerah, lahirlah konsep wilayah mengenai *international division of labour*, yaitu negara atau daerah dipandang tidak perlu menghasilkan sendiri semua barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan oleh warga masyarakatnya tetapi suatu daerah atau negara diminta untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa yang didukung oleh kelimpahan faktornya saja.

Maksudnya adalah agar alokasi dari faktor-faktor produksi yang seharusnya dilihat sebagai sumber-sumber ekonomi yang tersedia di masyarakat, memperoleh tingkat efisiensi yang tinggi dan selanjutnya barang-barang dan jasa-jasa yang tidak diproduksi sendiri oleh daerah karena kurangnya sumber daya yang tersedia, dicukupi dengan jalan pertukaran (perdagangan) baik antar daerah maupun antar negara.

Dari sisi yang lain, menurut Perroux, daerah-daerah berkembang menurut intensitas perkembangan yang berbeda-beda. Terdapat beberapa daerah yang mampu berkembang lebih cepat dari pada daerah lain atau secara relatif terdapat banyak daerah yang perkembangannya relatif tertinggal dari daerah lain. Teori Perroux dikenal dengan istilah kutub pertumbuhan (*growth pole*) merupakan teori yang menjadi dasar kebijakan pembangunan daerah.

Menurut Perroux, secara teori perkembangan daerah lebih banyak disebabkan oleh adanya faktor-faktor penentu dan faktor-faktor pendorong yang dimiliki masing-masing daerah. Faktor-faktor penentu adalah faktor-faktor yang terdapat dibalik *supply* dan *demand*, seperti tersedianya tenaga kerja yang berproduktivitas tinggi dan trampil dengan upah yang relatif murah, pendapatan per kapita masyarakat dan daerah yang relatif tinggi, tersedianya bahan baku, tanah yang subur, air, listrik, *propensity to consume* yang lebih besar, dan lain-lain. Sedangkan faktor-faktor pendorong adalah faktor-faktor yang ikut secara positif mendorong perkembangan daerah, tetapi di luar faktor-faktor penentu, misalnya lokasi, iklim, budaya, geografis, dan lain-lain.

Apabila suatu daerah memiliki faktor penentu dan faktor pendorong relatif lebih banyak dari pada daerah lain, maka daerah tersebut akan berkembang dengan intensitas perkembangan relatif lebih cepat. Oleh sebab itu, dalam suatu wilayah geografis yang memiliki beberapa daerah, akan terdapat suatu pusat pertumbuhan (*growth pole*), dan beberapa daerah lainnya akan menjadi *hinterland*, tergantung dari perbedaan proporsi faktor-faktor produksi yang dimilikinya.

Daerah-daerah maju yang menjadi pusat pertumbuhan akan memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) pada spesialisasi hasil-hasil tertentu dan daerah-daerah yang lain (*hinterland*) akan menghasilkan keunggulan komparatif untuk hasil-hasil yang lainnya. Maka selanjutnya ketika terjadi perdagangan antar daerah, akan terjadi kecenderungan penyebaran pertumbuhan ekonomi dari daerah maju ke daerah *hinterland*.

2.2.4 Kebijakan Pembangunan Daerah

Dengan perbedaan proporsi faktor seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, para pengambil keputusan atau para penyusun kebijakan pembangunan daerah dapat mempertimbangkan cara-cara pengalokasian sumber-sumber ekonomi, dalam arti bahwa alokasi sumber-sumber ekonomi daerah dapat dipertimbangkan secermat mungkin. Kemungkinan alokasi tersebut memperoleh keunggulan dalam pasar yang kompetitif karena sumber-sumber ekonomi tersebut terstruktur dalam keunggulan kompetitif di daerah tersebut.

Kebijakan pembangunan daerah harus dilandasi dengan pengetahuan atas kondisi sosial ekonomi masyarakat termasuk potensi, permasalahan, dan kemungkinan-kemungkinannya. Di samping mempertimbangkan masalah-masalah pemikiran di antara berbagai alternatif yang fundamental. Alternatif-alternatif kebijakan tersebut antara lain seperti meningkatkan produktivitas dan kesempatan kerja, meningkatkan potensi alokasi investasi sektor pembangunan ekonomi pada suatu daerah, mengurangi migrasi, mempertahankan ekologi lingkungan, mempertinggi efisiensi berbagai kegiatan perekonomian, dan sebagainya.

Pembangunan ekonomi suatu daerah adalah suatu proses di mana pemerintah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Setiap upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah dan masyarakat harus mampu menaksir potensi sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah (Arsyad, 1997:274).

Usaha pembangunan dan upaya perubahan struktural dapat mencakup perubahan ekonomi dengan diversifikasi pertanian; pengembangan produksi ekstraktif (pertambangan, kehutanan); pengembangan industri sekunder (manufaktur dan konstruksi); dan kegiatan sektor tersier (jasa-jasa dan kepariwisataan) serta penciptaan lapangan kerja produktif di bidang-bidang kegiatan yang meluas (Djojohadikusumo, 1994:xvii). Maka untuk mewujudkan upaya-upaya tersebut, pemerintah harus menerapkan kebijakan yang tepat dan menguntungkan.

Terbatasnya kemampuan daerah untuk membangun menyebabkan daerah tersebut tidak dapat mengatasi semua masalah yang ada, seperti masalah sosial politik dan ekonomi yang timbul akibat adanya pembangunan daerah yang tidak seimbang. Dengan demikian perlu dibuat suatu skala prioritas dari tujuan-tujuan pembangunan daerah untuk menentukan sampai di mana tujuan-tujuan tersebut dapat dicapai di masa yang datang. Tetapi dalam prakteknya sulit untuk menyatakan suatu kebijakan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang bersifat ekonomi, sosial dan politik.

Perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah bukanlah perencanaan dari suatu daerah, tetapi perencanaan untuk suatu daerah. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan-penggunaan sumberdaya-sumberdaya publik yang tersedia di daerah tersebut untuk memperbaiki sektor swasta dalam menciptakan

nilai sumberdaya-sumberdaya swasta secara bertanggungjawab (Arsyad, 1997:279).

Kebijakan perencanaan pembangunan perlu dibuat terlebih dahulu untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pelaksanaan pembangunan. Kebijakan pembangunan daerah harus diselaraskan dengan struktur dasar masing-masing daerah. Dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut, maka suatu daerah memerlukan dorongan atau rangsangan dalam membangun sumber-sumber yang ada di daerah tersebut. Dorongan atau rangsangan itu berupa penyediaan tenaga kerja dan tenaga ahli, prasarana-prasarana institusi keuangan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya secara baik serta mempunyai pengalaman dalam mengembangkan potensi-potensi ekonomi dan berbagai kegiatan ekonomi modern lainnya. Semua itu dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunannya.

2.2.5 Pengembangan Sektor Pariwisata

Secara etimologis, kata "*pariwisata*" berasal dari bahasa sansekerta. Kata pariwisata terdiri dari dua suku kata yaitu masing-masing kata "*pari*" yang artinya banyak, berkali-kali, berputar-putar dan lengkap. Serta kat "*wisata*" yang artinya perjalanan, bepergian yang dalam hal ini sinonim dengan kata travel dalam bahasa Inggris (Yoeti, 1990:103).

Pengertian lain mengatakan yang dimaksud pariwisata adalah sejumlah kegiatan, terutama yang ada kaitannya dengan kegiatan perekonomian yang secara langsung berhubungan dengan masuknya, adanya pendiaman dan Bergeraknya orang-orang asing keluar masuk suatu kota, daerah atau negara. Menurut UU No. 9 tahun 1990, tentang kepariwisataan, pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk perusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.

Demand atau permintaan dalam pariwisata pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a. *Potencial demand*, yaitu orang yang mempunyai potensi untuk melakukan kegiatan pariwisata (baik uang maupun fisik), akan tetapi belum ada waktu senggang untuk melakukan kegiatan tersebut.
- b. *Actual demand*, yaitu sejumlah orang yang sedang melakukan perjalanan pariwisata ke suatu daerah tujuan wisata tertentu.

Bagi Indonesia, terutama di daerah-daerah, pariwisata merupakan sektor yang sangat potensial untuk dikembangkan, karena keadaan alam di daerah-daerah di Indonesia yang sangat indah. Pariwisata menjadi istilah resmi setelah Munas Tourisme II di Tretes Jawa Timur tahun 1958. Pada tahun 1979 dikeluarkan PP No. 21 tahun 1979 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang kepariwisataan kepada daerah tingkat II.

Keuntungan-keuntungan pengembangan sektor pariwisata di daerah adalah membuka kesempatan kerja baru, menambah pemasukan atau pendapatan daerah, menambah devisa negara, merangsang pertumbuhan kebudayaan asli daerah, serta menunjang gerak pembangunan daerah (Spillane, 1991:138).

Kemajuan pengembangan pariwisata sebagai suatu industri ditunjang oleh berbagai macam usaha yang perlu dikelola secara terpadu dan baik, di antaranya adalah promosi untuk memperkenalkan produk pariwisata, transportasi yang muah dan lancar, kemudahan imigrasi atau birokrasi, akomodasi yang menjamin penginapan yang nyaman, pemandu wisata yang cakap dan trampil, penawaran barang dan jasa dengan mutu terjamin dan tarif harga yang wajar, pengisian waktu dengan atraksi dan kegiatan-kegiatan yang menarik, serta kondisi kebersihan dan kesehatan lingkungan hidup.

2.2.6 Analytic Hierarchy Process Methode

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini digunakan metode analisis data Analytic Hierarchy Process (AHP). Alasan pemilihan metode analisis didasarkan atas keumuman permasalahan yang terjadi dalam penentuan kebijakan pembangunan (daerah), di mana setiap *policy maker*, dalam hal ini pejabat maupun anggota masyarakat sering dihadapkan pada kompleksnya permasalahan yang dihadapi sehingga memunculkan banyak

pertimbangan dan alternatif dalam pengambilan keputusan. Permasalahan yang kompleks tersebut sulit untuk dipecahkan dengan analisis yang sederhana, apalagi permasalahan banyak yang tidak terstruktur. Banyaknya pertimbangan dalam penentuan kebijaksanaan muncul dalam proses pengambilan keputusan dengan berbagai variabel yang diperhitungkan serta kompleksitas yang dihadapi. Sementara itu, alternatif kebijakan yang diambil tidak hanya satu atau dua saja, melainkan meliputi sederet kebijakan sehingga sulit untuk menentukan prioritasnya, bahkan terkadang kebijakan yang diambil bila dikaitkan satu sama lain menjadi kurang konsisten (Sandy, 2002:30).

Pendekatan AHP bukan hanya besar manfaatnya bagi perencanaan pembangunan daerah, tetapi juga dapat membantu mengambil keputusan di daerah untuk menentukan prioritas sederetan tujuan, skenario, masalah, dan kebijakan. Bahkan, suatu kasus konflik juga dapat diselesaikan secara kompromi dengan menggunakan AHP, yaitu dengan menerapkan prinsip *pareto optimum* suatu kondisi *non-zero sum*.

AHP juga menangani persoalan-persoalan sesuai dengan interaksi-interaksi pada masalah itu sendiri. Proses ini membuat para pengambil keputusan dapat memaparkan persoalan sebagaimana yang dilihat dalam kompleksitasnya dan memperluas definisi serta strukturnya melalui pengulangan. Untuk mengidentifikasi persoalan yang kritis, mengidentifikasi strukturnya, dan menemukannya serta menyelesaikan konflik. AHP memerlukan informasi dan pertimbangan dari para pengambil keputusan tersebut. AHP mensintesis penilaian-penilaian yang didapat menjadi suatu taksiran menyeluruh dari prioritas-prioritas relatif berbagai alternatif.

AHP digunakan untuk merangang timbulnya gagasan untuk melaksanakan keputusan yang kreatif, juga untuk mengevaluasi keefektifan keputusan tersebut. Selain itu, untuk membantu pengambilan keputusan di suatu daerah, menetapkan informasi yang patut dikumpulkan guna mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang relevan di suatu daerah.

AHP didasarkan pada teori pengukuran dan teori hirarki, sedangkan metodologi yang dipakai berkisar penentuan urutan pentingnya sederetan kriteria

dan pilihan kebijakan. Salah satu kemungkinan pendekatan AHP, khususnya pemakaian di tingkat daerah, adalah pengendalian terhadap persepsi seseorang di daerah tersebut, terutama yang paling mengetahui suatu bidang tertentu yang dianalisis. Bidang yang dimaksud sangat terbatas pada kekhususan aparat daerah yang bersangkutan.

Metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) merupakan metode pengambilan keputusan, yang peralatan utamanya adalah sebuah hirarki. Data utama dari AHP ini adalah persepsi manusia yang dianggap *expert*. Kriteria *expert* disini bukan berarti jenius, pintar atau bergelar atau profesor, melainkan lebih mengarah pada orang yang lebih mengerti benar permasalahan yang dihadapi dalam suatu penelitian. Metode AHP ini pertama kali diperkenalkan dan dikembangkan oleh Prof. Thomas L. Saaty, seorang guru besar pada Wharton School, University of Pennsylvania pada tahun 1970-an (Sandy, 2002:30).

Menurut Saaty (dalam Sandy, 2002:31), AHP merupakan suatu model yang luwes yang memberi gagasan-gagasan dan mengidentifikasi persoalan dengan cara membuat asumsi mereka masing-masing dan memperoleh pemecahan yang diinginkan darinya. Proses ini juga memungkinkan orang menguji kepekaan hasilnya terhadap perubahan informasi serta dirancang untuk lebih menampung sifat alamiah manusia ketimbang memaksa kita ke cara berpikir yang mungkin justru berlawanan dengan hati nurani AHP merupakan proses yang ampuh untuk menanggulangi berbagai persoalan politik dan sosial-ekonomi yang kompleks.

AHP dirancang untuk mengetahui persepsi orang yang berhubungan erat dengan tujuan permasalahan tertentu melalui prosedur yang dirancang untuk sampai pada suatu skala preferensi di antara berbagai alternatif. Metode AHP ini didasarkan pada prinsip bahwa dalam pengambilan keputusan, pengalaman dan pengetahuan seseorang minimal sama nilainya dengan data-data yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Dengan memasukkan persepsi seseorang dalam proses pengambilan keputusan, maka AHP dapat menutupi kelemahan utama dari metode pengambilan keputusan yang selama ini ada yaitu bagaimana memasukkan unsur-unsur kuantitatif dalam metode pengambilan keputusan.

1. Aksioma AHP

Untuk dapat menggunakan dan memahami proses bekerjanya metode AHP, maka harus diperhatikan adanya aksioma-aksioma dasar. Menurut Saaty (dalam Sulistyanti, 2000:74) terdapat empat aksioma dasar dalam metode AHP, yaitu:

1. *Reciprokal Comparison*, artinya pengambilan keputusan harus membuat perbandingan dan menyatakan preferensinya. Preferensi harus memenuhi syarat resiprokal, yaitu bila A lebih disukai dari B dengan skala X, maka B lebih disukai dari A dengan skala $\frac{1}{x}$.
2. *Homogeneity*, artinya preferensi seseorang harus dapat dinyatakan dalam skala terbatas atau dengan kata lain elemen-elemennya dapat dibandingkan satu sama lain. Kalau aksioma ini tidak terpenuhi maka elemen-elemen yang dibandingkan tidak homogen dan harus dibentuk suatu kelompok elemen yang baru.
3. *Independence*, artinya preferensi dinyatakan dengan menganggap bahwa kriteria tak dipengaruhi oleh alternatif-alternatif yang melainkan oleh obyek keseluruhan. Ini menunjukkan pola ketergantungan dalam AHP adalah selaras ke atas, artinya perbandingan antara elemen-elemen dalam suatu level dipengaruhi atau tergantung kepada elemen-elemen dalam level di atasnya.
4. *Expectation*, artinya untuk tujuan pengambilan keputusan struktur hirarki diasumsikan lengkap. Apabila asumsi ini tidak dipenuhi maka pengambil keputusan tidak memakai seluruh kriteria atau *objective* yang tersedia, sehingga keputusan yang diambil dianggap tidak lengkap.

Apabila aksioma 1 tidak terpenuhi maka preferensi dari sepasang elemen yang dibandingkan tidak tepat atau tidak jelas. Aksioma 2 sebenarnya menjelaskan keterbatasan otak manusia dalam membuat perbandingan utamanya untuk elemen-elemen yang kurang jelas hubungannya satu sama lain atau perbedaannya terlalu besar. Pelanggaran aksioma 3 dimungkinkan dalam AHP yang bentuk hirarkinya adalah non linier. Dalam hirarki jenis ini mungkin terjadi hubungan timbal balik antara kriteria dengan alternatif. Pemecahan seperti ini

dilakukan dengan pendekatan supermatriks. Aksioma 4 menyiratkan ekspektasi dan persepsi manusia yang lebih menonjol dibandingkan rasionalitas dalam menyatakan preferensi. Yang terpenting pengambil keputusan adalah *expert*, yakni mengerti benar permasalahan yang dihadapi.

2. Prinsip Dasar AHP

Untuk dapat memecahkan masalah dengan metode AHP, ada beberapa prinsip dasar yang harus dimengerti, yakni:

1. *Decomposition*, merupakan proses penguraian permasalahan atau elemen menjadi unsur-unsurnya sehingga tidak dapat diuraikan atau dijabarkan lagi. Dari proses penguraian tersebut akan didapatkan beberapa level hirarki atas persoalan yang dihadapi. Ada dua macam hirarki, yaitu hirarki lengkap bila semua elemen pada suatu level memiliki semua elemen yang ada pada level berikutnya, dan bila tidak demikian disebut hirarki tak lengkap.
2. *Comparative Judgement*, merupakan proses penilaian kepentingan relatif terhadap elemen-elemen yang terdapat dalam suatu level sehubungan dengan level di atasnya. Penilaian ini merupakan inti dari AHP, karena akan ditemukan prioritas dari elemen atau variabel yang ditentukan. Hasil penilaian akan mudah diikuti bila disajikan dalam matriks a_{ij} berikut ini:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{3n} \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Matriks ini mempunyai sifat resiprokal, yaitu:

$$a_{ji} = \frac{1}{a_{ij}}$$

di mana i dan j berturut-turut merujuk pada baris dan kolom.

Misalkan $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ merupakan himpunan elemen yang sebanyak n dan $W_1, W_2, W_3, \dots, W_n$ merupakan timbangan (*weight*) atau intensitas masing-masing elemen. AHP menentukan perbandingan antara dua elemen (*pairwise comparison*) menurut timbangan atau intensitasnya. Perbandingan antar dua elemen tersebut dapat ditunjukkan pada matriks W_1/W_2 berikut:

	A_1	A_2	A_3	A_n
A_1	W_1/W_1	W_1/W_2	W_1/W_3	W_1/W_n
A_2	W_2/W_1	W_2/W_2	W_2/W_3	W_2/W_n
A_3	W_3/W_1	W_3/W_2	W_3/W_3	W_3/W_n
A_n	W_n/W_1	W_n/W_2	W_n/W_3	W_n/W_n

Matriks ini menunjukkan tingkat kepentingan setiap A terhadap yang lainnya, yang diukur dengan skala ordinal. Untuk mengukur tingkat kepentingan tersebut, AHP mengusulkan skala seperti yang tercantum pada tabel 1, yang dimulai dari sama-sama pentingnya (*equally preferred*) hingga mutlak pentingnya (*extremely preferred*). Penilaian atau *judgement* bisa dilakukan atas dua pernyataan yaitu: (1). elemen mana yang lebih (penting, disukai, mungkin terjadi,...), (2). berapa kali lebih (penting, disukai, mungkin terjadi,...).

Pemilihan skala 1 sampai 9 didasarkan pada pemilihan psikologi, pendapat pemakaian AHP, perbandingan skala lain, dan otak kemampuan manusia dalam menyuarakan preferensinya. Skala yang paling kecil adalah satu untuk menyatakan bahwa kedua elemen yang dibandingkan sama pentingnya atau disukai. Agar diperoleh skala yang bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka untuk penilaian perbandingan diperlukan seseorang yang mempunyai pengertian yang menyeluruh mengenai seluruh elemen atau variabel yang ingin dibandingkan.

Tabel 2.1 Skala Preferensi AHP

Skala	Definisi	Keterangan
1	<u>Sama-sama</u> Disukai/penting	Kriteria A dan B <u>sama-sama</u> disukai/pentingnya
3	<u>Cukup sedikit</u> Disukai/penting	Kriteria A <u>cukup sedikit</u> disukai/pentingnya dibanding kriteria B
5	<u>Lebih</u> Disukai/penting	Kriteria A <u>lebih</u> disukai/pentingnya dibanding kriteria B
7	<u>Sangat</u> Disukai/penting	Kriteria A <u>sangat</u> disukai/pentingnya dibanding kriteria B
9	<u>Mutlak</u> Disukai/penting	Kriteria A <u>mutlak</u> disukai/pentingnya dibanding kriteria B
2, 4, 6, 8	Nilai-nilai antara	Jika ragu-ragu dalam memilih skala, misalkan memilih sangat disukai atau mutlak disukai
Resiprokal	Jika A dibanding B adalah, katakanlah, skala 7, maka B dibanding A adalah skala $\frac{1}{7}$	Asumsi yang masuk akal

Sumber: Sulistyanti (2000)

3. *Synthesis of priority*. Setelah diperoleh skala perbandingan berpasangan, selanjutnya dicari dengan komputer atau secara manual suatu *eigenvector* yang menunjukkan *local priority* pada suatu hirarki. Oleh karena matriks *pairwise comparison* terdapat pada setiap hirarki, maka untuk mendapatkan *global priority* harus dilakukan sintesis di antara *local priority*. Penentuan urutan tiap elemen berdasarkan prioritas melalui sintesis dinamakan *priority setting*.
4. *Logical consistency* adalah prinsip rasionalitas AHP. Ada tiga makna yang terkandung dalam konsep konsistensi, yaitu:

- a. Obyek-obyek yang serupa atau sejenis bisa dikelompokkan sesuai dengan relevansinya.
- b. Matriks perbandingan antar dua elemen bersifat resiprokal, artinya jika A_1 adalah dua kali lebih penting dari A_2 , maka A_2 adalah setengah kali lebih penting dari A_1 .
- c. Hubungan antar elemen bersifat transitif. Berdasarkan tiga makna tersebut, konsistensi yang dimaksud dalam AHP bukanlah sekedar *transitivity*.

3. Prioritas, Eigenvector, dan Konsistensi

Dari setiap matriks *pairwise comparison* akan keluar *eigenvector* yang menunjukkan tingkat prioritas dari elemen atau variabel yang dibandingkan dalam matriks tersebut. Pencarian matriks prioritas (*eigenvector*) dilakukan melalui perhitungan *eigenvector*. Proses penentuan *eigenvector* dan *eigenvalue* dari suatu matriks mensyaratkan suatu yang *reducible* dan atau non negatif. Dengan skala 1 sampai 9, maka syarat tersebut dapat dipenuhi karena elemen terkecil adalah $\frac{1}{9}$ dan terbesar 9.

Sebenarnya banyak cara untuk menghitung prioritas tiap elemen dari matriks *pairwise comparison*. Banyak cara yang termudah misalnya dengan menjumlahkan angka-angka dalam matriks tersebut menurut baris atau kolom, kemudian bobot setiap elemen ditentukan dengan membandingkan jumlah per baris atau kolom tadi dengan total penjumlahan baris atau kolom. Cara ini dianggap kurang tepat karena hanya mencerminkan jumlah elemen terhadap matriks secara keseluruhan dan tidak memperhatikan pengaruh suatu elemen terhadap matriks yang lain.

$$\sqrt[4]{\frac{W_1}{W_1} \times \frac{W_1}{W_2} \times \frac{W_1}{W_3} \times \frac{W_1}{W_4}} = a$$

$$\sqrt[4]{\frac{W_2}{W_1} \times \frac{W_2}{W_2} \times \frac{W_2}{W_3} \times \frac{W_2}{W_4}} = b$$

$$\sqrt[4]{\frac{W_3}{W_1} \times \frac{W_3}{W_2} \times \frac{W_3}{W_3} \times \frac{W_3}{W_4}} = c$$

$$\sqrt[4]{\frac{W_4}{W_1} \times \frac{W_4}{W_2} \times \frac{W_4}{W_3} \times \frac{W_4}{W_4}} = d$$

$$a + b + c + d$$

Kemudian vektor (a, b, c, d) dinormalkan untuk mengetahui posisi relatif masing-masing elemen.

$$\frac{a}{a+b+c+d} = x_1$$

$$\frac{b}{a+b+c+d} = x_2$$

$$\frac{c}{a+b+c+d} = x_3$$

$$\frac{d}{a+b+c+d} = x_4$$

Jika hirarki memiliki beberapa vektor prioritas (*local priority*), vektor-vektor tersebut dapat disintesis menjadi *global priority*. Proses sintesis ini dinamakan *priority setting*.

Perhitungan prioritas pada matriks *pairwise comparison* juga harus memperhatikan tingkat konsistensi, karena bagaimanapun juga inkonsistensi yang terlalu besar tidak dapat diterima dan bisa menjurus pada pengambilan keputusan yang salah. Metode AHP akan mengukur konsistensi penilaian yang dimulai dengan menghitung *consistency index* (CI), yakni:

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1}$$

di mana n adalah jumlah elemen yang hendak dibandingkan, dan λ_{\max} adalah *eigenvalue*. Kemudian dihitung *consistency ratio* (CR), yaitu *consistency index* dibagi dengan *random index* (RI), yang disajikan pada tabel 2.2. Nilai CR diusahakan berkisar tidak lebih dari 10%, seperti rumus berikut:

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

Tabel 2.2 Indeks Random

Orde Matriks	3	4	5	6	7	8	9	10
Indeks Random	0,58	0,90	1,12	1,24	1,32	1,41	1,45	1,49

Sumber: Sulistyanti (2000)

Indeks random adalah indeks konsistensi (CI) matriks resiprokal yang dibentuk secara random. Indeks ini (tabel 2) diperoleh setelah melalui eksperimen terhadap 100 sampel dengan matriks orde 1 hingga 15, dengan hipotesis bahwa indeks akan meningkat searah dengan besarnya orde matriks.

Dengan kelebihan dan kekurangan metode AHP, diharapkan mampu untuk memberikan arahan bagi pengembangan sektor kepariwisataan di Kabupaten Jember.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskripsi. Metode ini bertujuan membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Suryabrata, 1991:19).

3.1.2 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah persepsi orang atau sekelompok orang yang *expert* atau pakar dan dianggap mengerti mengenai masalah kebijakan kepariwisataan yang serta berhubungan erat terhadap masalah kepariwisataan, dalam hal ini adalah para pengambil keputusan (*decision maker*) di Kabupaten Jember.

3.1.3 Populasi

Populasi dari penelitian ini adalah semua orang baik selaku pejabat publik maupun perseorangan yang dipandang memahami permasalahan pariwisata di Kabupaten Jember. Dalam kategori ini yang termasuk *expert* (ahli) dalam kepariwisataan antara lain:

- a. Jajaran birokrasi pemerintah daerah mulai dari pengambil keputusan di tingkat pusat hingga di tingkat dinas, yang dalam hal ini adalah:
 - Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Jember
 - Pejabat Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember
 - Pejabat Dinas Pariwisata dan Kesenian Kabupaten Jember
- b. Unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- c. LSM yang mempunyai perhatian dan berkompeten terhadap kepariwisataan
- d. Kalangan akademisi

- e. Praktisi yang berkaitan dengan kepariwisataan, selaku pelaku bisnis yang berkaitan dengan kepariwisataan

3.2 Metode Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel yang dilakukan secara sengaja yakni dipilih beberapa orang dari kategori yang termasuk *expert* yang telah disebutkan pada populasi di atas, yang benar-benar memahami pariwisata. Dalam hal ini sampel diambil secara proporsional.

Dalam penelitian ini dilihat bukan dari jumlah sampel yang dipilih, tetapi dilihat dari keakuratan informasi yang diperoleh.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan bantuan kuesioner. Kuesioner merupakan alat pengumpulan data dengan cara memberikan daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi. Penyebaran kuesioner diberikan kepada responden yang berhubungan erat (terlibat langsung) dan *expert* (ahli) dengan masalah kepariwisataan di Kabupaten Jember.

3.3 Metode Analisis Data

3.3.1 Pembentukan Hierarki

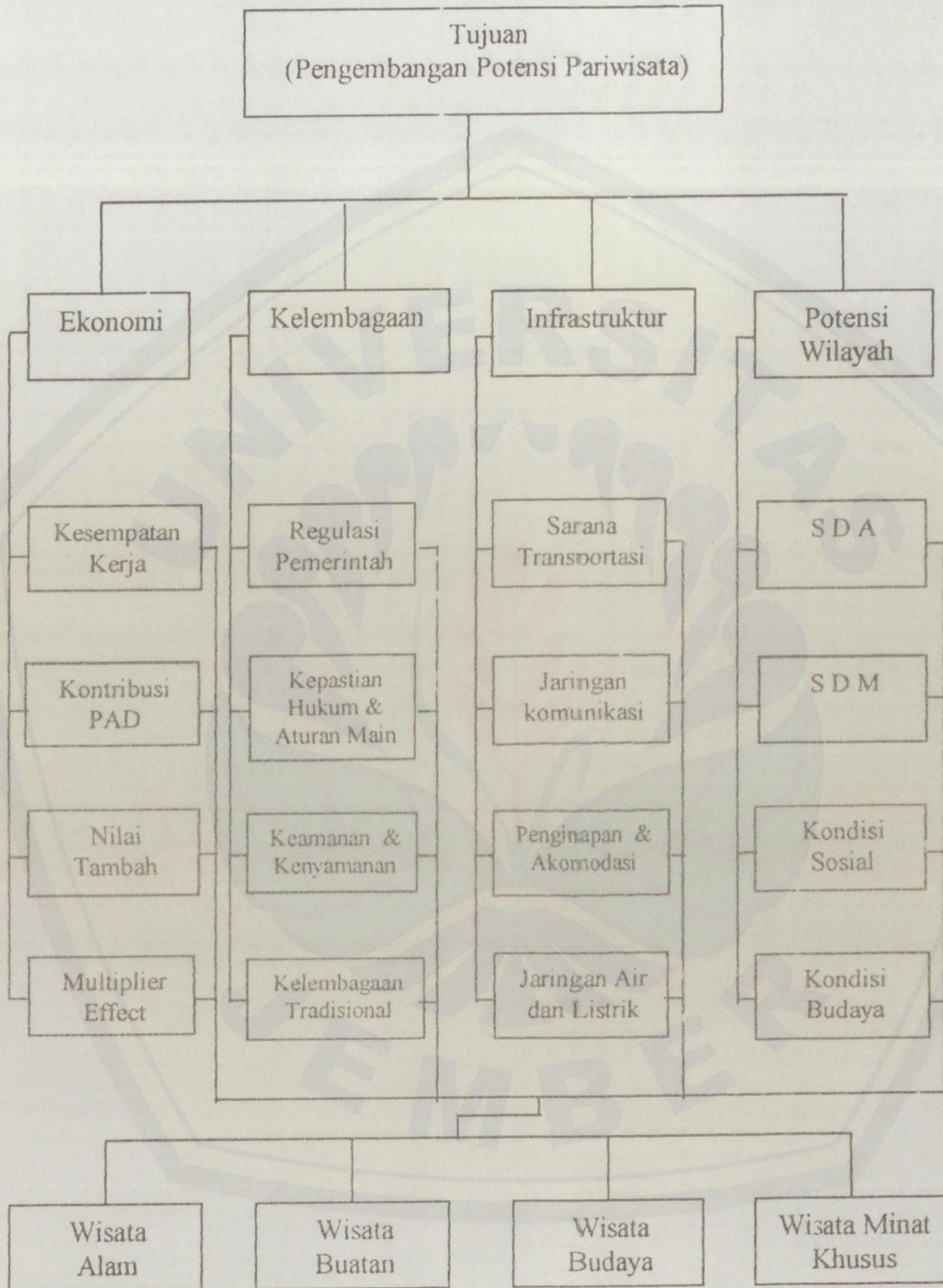
Menurut Ramadhan (dalam Nugraha, 2000:37), aplikasi model AHP dapat dibagi dalam dua tahapan, yaitu penyusunan hirarki dan evaluasi hirarki. Penyusunan hirarki yang biasa dikenal sebagai dekomposisi mencakup tiga proses yang saling berhubungan dan berurutan, yaitu identifikasi level dan elemen, definisi konsep, dan formulasi pertanyaan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi level-level dan elemen-elemen dalam suatu level, kemudian setiap elemen tersebut didefinisikan dan dipakai dalam formulasi pertanyaan. Pada tahapan evaluasi hirarki ada dua hal yang dilakukan, yaitu penilaian dan sintesa hasil. Penilaian berarti pengambil keputusan menterjemahkan semua informasi yang tersedia dan persepsinya untuk membandingkan sepasang elemen.

Pada dasarnya tidak ada pedoman umum untuk membuat hirarki, tergantung dari pengalaman dan pengetahuan seseorang. Namun paling tidak

hirarki harus cukup kompleks untuk menangkap suasana, tetapi cukup sedikit agar sensitive terhadap perubahan-perubahan. Menurut Saaty (1993:30) ada dua macam hirarki, yakni struktural dan fungsional. Pada hirarki struktural, system yang kompleks disusun ke dalam komponen-komponen pokoknya dalam urutan menurun menurut sifat struktural mereka, misalnya ukuran, warna atau umur. Sebagai contoh hirarki struktural dari alam semesta adalah akar, menurun dari galaksi ke konstelasi, ke sistem solar, ke planet dan seterusnya, menurun ke atom, inti, proton dan netron. Hirarki struktural sangat erat kaitannya dengan cara otak kita menganalisis hal yang kompleks, yaitu dengan memecah-mecah obyek yang ditangkap oleh indera menjadi sebuah gugusan, subgugusan, dan gugusan yang lebih kecil lagi. Sebaliknya hirarki fungsional menguraikan sistem yang kompleks menjadi elemen-elemen pokoknya menurut hubungan esensial mereka.

Hirarki fungsional dibagi dua jenis, yakni hirarki lengkap dan tak lengkap. Dalam hirarki lengkap, semua elemen pada suatu level memiliki keterkaitan dengan elemen pada level berikutnya, sedangkan pada hirarki tak lengkap tidak semua elemen pada suatu level memiliki keterkaitan dengan level berikutnya.

Pada penelitian ini, berdasarkan data potensi pariwisata yang telah ditetapkan, maka dapat digambarkan bentuk hirarki kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Jember disusun sebagai berikut:



Sumber: Dinas Pariwisata dan Kesenian Kabupaten Jember (2004), diolah.

KETERANGAN DIAGRAM

Hirarki Level 1:

Kriteria pengembangan potensi wisata:

1. Ekonomi : Keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari pengembangan potensi pariwisata
2. Kelembagaan : Adanya lembaga-lembaga serta peraturan-peraturan yang mengatur serta bertanggungjawab dalam pengelolaan suatu potensi pariwisata
3. Infrastruktur : Ketersediaan sarana dan prasarana pada suatu wilayah yang mendukung perkembangan potensi pariwisata
4. Potensi wilayah : Keunggulan-keunggulan yang dimiliki suatu wilayah yang mendukung perkembangan wisata

Hirarki Level 2:

Sub kriteria level 1:

1. Kesempatan Kerja : Ketersediaan lapangan kerja yang diciptakan oleh pengembangan potensi wisata
2. Kontribusi PAD : Besarnya pemasukan daerah yang diperoleh dari pengembangan potensi wisata
3. Nilai Tambah : Adanya nilai tambah di sektor lain yang ditimbulkan dari pengembangan potensi wisata
4. Multiplier effect : Dampak-dampak lain yang diakibatkan oleh pengembangan potensi wisata
5. Regulasi Pemerintah : Adanya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengelola suatu potensi wisata
6. Kepastian Hukum & Aturan Main : Adanya status hukum yang jelas pada suatu potensi wisata
7. Keamanan & Kenyamanan : Keadaan suatu potensi wisata yang menjamin keamanan serta kenyamanan para wisatawan
8. Kelembagaan Tradisional : Adanya lembaga tradisional yang mengatur adat istiadat suatu potensi wisata

9. Sarana transportasi : Ketersediaan jalur-jalur serta alat-alat transportasi yang memudahkan mobilitas
10. Jaringan komunikasi : Ketersediaan sarana dan prasarana pada suatu lokasi wisata yang mempermudah komunikasi
11. Sarana penginapan : Ketersediaan serta fasilitas penginapan pada suatu lokasi wisata
12. Jaringan air dan listrik : Ketersediaan sarana dan prasarana pada suatu lokasi wisata yang memudahkan untuk memperoleh air bersih dan jaringan listrik
13. S D A : Keadaan sumberdaya alam pada suatu lokasi wisata (keindahan, kebersihan, ketenangan)
14. S D M : Adanya tenaga-tenaga trampil dan berpengalaman dalam mengelola potensi wisata
15. Kondisi sosial : Keadaan sosial masyarakat sekitar di lingkungan lokasi wisata
16. Kondisi budaya : Kondisi budaya masyarakat sekitar lokasi wisata

Hirarki Level 3:

Alternatif potensi wisata:

1. Wisata Alam : Alternatif potensi wisata yang mengandalkan daya tarik keindahan alam untuk menarik pengunjung, contoh: Pantai Watu Ulo dan Papuma, Lereng Gunung Raung, Air Terjun Tancak, dsb.
2. Wisata Buatan : Alternatif potensi wisata yang merupakan hasil pengembangan manusia, contohnya: Pemandian Rembangan, Pemandian Kebon Agung, dsb.
3. Wisata Budaya : Alternatif potensi wisata yang merupakan hasil kebudayaan warisan leluhur, contohnya: Pesanggrahan Juk Zhedep (Desa Panduman-Jelbuk), Goa Pertapaan (Desa Sucopangepok-Jelbuk), dsb.

4. Wisata Minat Khusus : Alternatif potensi wisata yang dapat digunakan sebagai kegiatan-kegiatan tertentu, seperti penelitian dan pengamatan, contohnya: Taman Nasional Meru Betiri, Taman Kupu-kupu (Tropicana Butterfly).

3.3.2 Pengisian Kuesioner

Kuesioner ditujukan kepada responden yang tergolong *expert*. Yang dimaksud *expert* di sini adalah mereka yang mempunyai pengertian menyeluruh terhadap permasalahan yang akan dipecahkan. Kuesioner dapat diisi secara individu maupun kelompok. Setelah kuesioner diisi, jawaban-jawaban dari para responden tersebut dikumpulkan dan dirata-rata untuk memperoleh jawaban yang mewakili. Rata-rata yang digunakan adalah rata-rata geometri (*geometric mean*) seperti rumus berikut:

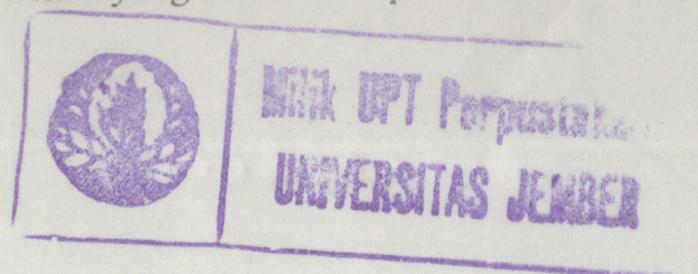
$$\sqrt[n]{a_1 \times a_2 \times a_3 \times a_n}$$

Pengolahan data dari kuesioner yang telah diisi dan dirata-rata tersebut menggunakan *hardware* komputer yang dilengkapi dengan *software expert choice* dengan tujuan kecepatan perhitungan.

3.4 Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian ini maka perlu diberikan definisi yang berkaitan dengan masalah tersebut, yaitu:

1. Sektor pariwisata adalah suatu sektor yang menangani kegiatan kepariwisataan, pengembangan obyek-obyek wisata baik pemandangan alam maupun peninggalan benda sejarah, hasil kebudayaan manusia di masa lampau yang dipergunakan sebagai tempat wisata. Dalam penelitian ini sektor pariwisata diartikan sebagai potensi-potensi wisata yang ada di Kabupaten Jember.



IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Kondisi Umum Kabupaten Jember

Kabupaten Jember dari segi geografis memiliki luas wilayah sekitar 329.333,94 Ha atau sekitar 3.293,34 km², terletak pada ketinggian antara 0-3.330m dari permukaan laut. Kabupaten Jember terletak pada posisi 6°27'9" sampai dengan 7°14'33" Bujur Timur dan 7°59'6" sampai dengan 8°33'56" Lintang Selatan. Dari segi topografi, Kabupaten Jember berbentuk dataran ngarai yang subur pada bagian tengah dan selatan., dikelilingi pegunungan yang memanjang sepanjang batas utara dan timur serta Samudera Indonesia sepanjang batas selatan dengan Pulau Nusa Barong yang merupakan pulau satu-satunya yang ada di wilayah Kabupaten Jember. Batas-batas administrasi Kabupaten Jember adalah:

1. Sebelah utara → berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan sebagian kecil Kabupaten Probolinggo
2. Sebelah timur → berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi
3. Sebelah selatan → berbatasan dengan Samudera Indonesia
4. Sebelah barat → berbatasan dengan Kabupaten Lumajang

Kabupaten Jember sendiri secara administratif terbagi menjadi 31 kecamatan, 222 desa, dan 22 kelurahan. Dari 31 wilayah kecamatan tersebut, kecamatan Tempurejo memiliki wilayah terluas (524,46 km²) atau sekitar 15,92 % dari luas wilayah Kabupaten Jember. Sedangkan kecamatan Kaliwates memiliki luas wilayah yang paling kecil dengan luas hanya 24,94 km². Secara keseluruhan wilayah Kabupaten Jember memiliki curah hujan yang relatif cukup besar antara 1.471-3.767 mm per tahun. Di samping itu sebagian wilayah Jember merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 100-500 m dan merupakan dataran yang cukup subur dan cocok untuk mengembangkan komoditi-komoditi pertanian dan perkebunan. Selain itu, Kabupaten Jember juga memiliki potensi dalam mengembangkan industri pariwisata dan perdagangan yang ditunjang oleh ketersediaan sarana dan prasarana jalan serta transportasi yang memadai.

Angka pertumbuhan penduduk berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 1980, 1990 dan 2000, di Kabupaten Jember dalam kurun waktu 1980-1990 menunjukkan kenaikan sebesar 0,94 %, sedangkan pada tahun 1990-2000 angka pertumbuhan penduduk tersebut turun menjadi 0,61 %. Jumlah penduduk sesuai hasil sensus tahun 2000, penduduknya berjumlah 2.162.309 (49,12 %) laki-laki dan 1.100.379 (50,88 %) perempuan, dengan kepadatan 852 jiwa/km. Pada akhir tahun 2003 jumlah tersebut turun sebesar 1,47 % menjadi 2.131.289 jiwa. Tetapi jumlah penduduk tahun 2003 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2002. Jumlah penduduk tahun 2002 berjumlah 2.123.968 jiwa atau meningkat sebesar 0,34 %.

4.1.2 Struktur Perekonomian Kabupaten Jember

Komposisi yang membentuk perekonomian suatu wilayah atau yang berperan dalam perekonomian dapat diartikan sebagai struktur ekonomi. Struktur ekonomi dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu aspek suplai atau sumber pendapatan, aspek kegiatan ekonomi dari aktivitas produksi, investasi, moneter dan fiscal, dan aspek regional.

Untuk jangka pendek struktur ekonomi berguna untuk menggambarkan tipe atau corak perekonomian suatu daerah, bila sektor primer (*agriculture*) yang dominan berarti daerah tersebut menganut tipe agraris, demikian pula apabila sektor sekunder (*manufactur*) yang dominan maka daerah tersebut menganut tipe industri. Untuk jangka panjang struktur ekonomi dapat menunjukkan arah dan keberhasilan pembangunan ekonomi dengan melihat transformasi yang terjadi.

Ditinjau dari segi ekonomi, Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah yang mempunyai pertumbuhan ekonomi relatif stabil dan cukup tinggi. Secara riil pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember dilihat dari perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitannya setelah didera berbagai krisis yang berkepanjangan. Pada tahun 2000 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember sudah menunjukkan kepulihan kembali, yaitu dengan pertumbuhan sebesar 3,33 %, kemudian pada tahun 2001 meningkat 3,49 %, dan pada tahun 2002 juga meningkat sebesar 4,14 %. Sampai

dengan tahun 2002 besaran PDRB yang dimiliki Kabupaten Jember berturut-turut adalah tahun 2000 sebesar 5.13952,56 juta, tahun 2001 sebesar 5.943.201,79 juta, dan tahun 2002 sebesar 6.744.210,72 juta.

Kabupaten Jember ditinjau dari "*supply side*" dapat diklasifikasikan sebagai daerah yang menjadikan sektor primer (pertanian) sebagai sektor basis. Hal ini didasarkan atas kontribusi sektor primer (pertanian) terhadap PDRB Kabupaten Jember yang mencapai hampir 50 %. Meskipun demikian ada fenomena menarik dari perkembangan sektor primer. Apabila dicermati kontribusi sektor primer terhadap PDRB Kabupaten Jember dari tahun ke tahun akan didapati bahwa kontribusi sektor ini menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun. Dengan menggunakan interval waktu selama tiga tahun yaitu tahun 2000 sampai dengan tahun 2002, diketahui bahwa tahun 2000 kontribusi sektor ini adalah sebesar 50,59 %, setelah itu mengalami penurunan menjadi 50,52 % pada tahun 2001 dan 49,33 % pada tahun 2002 (tabel 4.1).

Tetapi hal sebaliknya terjadi pada sektor manufaktur atau sektor sekunder, kontribusi sektor ini menunjukkan gejala yang baik. Pada tahun 2000 kontribusi sektor sekunder adalah 12,61 %, kemudian pada tahun 2001 mengalami penurunan menjadi 12,31 %. Penurunan ini disebabkan penurunan pada sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor bangunan. Pada tahun 2002 kontribusi sektor ini mengalami peningkatan kembali menjadi 13,37 % (tabel 4.1).

Sedangkan peranan sektor tersier selama tiga tahun belakangan ini mengalami peningkatan. Indikasi tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Perbandingan Struktur Ekonomi Kabupaten Jember Tahun 2001-2002 dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (persen)

Sektor	2000	2001	2002
(1)	(2)	(3)	(4)
Primer (<i>Agriculture</i>)	50,59	50,52	49,33
1. Pertanian	50,28	50,22	49,04
2. Pertambangan dan penggalian	0,31	0,30	0,29
Sekunder (<i>Manufaktur</i>)	12,61	12,31	12,37
3. Industri pengolahan	7,53	7,59	7,72
4. Listrik, gas dan air bersih	0,94	0,93	0,97
5. Bangunan	4,14	3,79	3,68
Tersier (<i>Service</i>)	36,81	37,17	38,30
6. Perdagangan, hotel dan restoran	18,71	18,76	19,73
7. Pengangkutan dan komunikasi	4,13	4,13	4,14
8. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	5,48	5,50	5,76
9. Jasa-jasa	8,49	8,78	8,76

Sumber: BPS Kabupaten Jember, 2002

4.1.3 Perkembangan Sektor Pariwisata di Kabupaten Jember

Pengembangan obyek wisata dan daya tarik wisata dilakukan dengan melihat semua potensi yang ada di lingkungan sendiri maupun faktor lingkungan eksternal yang ada. Pengembangan obyek wisata tersebut, di samping akan menunjang program pariwisata daerah, juga diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi pemasukan pendapatan daerah dalam sektor pariwisata. Perkembangan sektor pariwisata biasanya diukur dengan jumlah wisatawan yang berkunjung atau lebih spesifik lagi dari jumlah pengeluaran para wisatawan. Akan

tetapi kedatangan wisatawan tentunya tidak terlepas dari obyek-obyek wisata serta wisata-wisata lain yang mendukung kegiatan tersebut seperti akomodasi, transportasi, dan lain-lain.

Kabupaten Jember mempunyai potensi yang cukup besar di sektor pariwisata. Apabila potensi itu dimanfaatkan maka akan memberikan hasil yang positif terutama dalam meningkatkan pendapatan di sektor pariwisata. Saat ini Kabupaten Jember memiliki 36 lokasi obyek wisata, namun dari obyek-obyek wisata tersebut hanya 19 obyek wisata yang telah dikembangkan (lihat lampiran 6). Obyek-obyek tersebut di antaranya:

Tabel 4.2 Nama Obyek Wisata, Lokasi, Jarak, dan Jenis Obyek Wisata

No.	Nama Obyek Wisata	Jarak dari Kota Jember (km)	Jenis Obyek Wisata
1.	Pantai Watu Ulo	Ds. Sumberejo, Ambulu 40 km selatan kota	Wisata alam pantai selatan
2.	Pantai Papuma	Ds. Lojejer, Wuluhan 40 km selatan kota	Wisata alam pasir putih
3.	Pemandian Rembangan	Ds. Kemuning Lor, Arjasa 15 km barat kota	Panorama buatan, kolam dan hotel
4.	Panorama Bukit Bedadung	Kel. Tegalbesar, Kaliwates 3 km selatan kota	Panorama buatan, kolam, gardu pandang
5.	Agrowisata Gunung Gunitir	Ds. Tanah Manis, Silo 30 km kota	Panorama alam, perkebunan kopi
6.	Padang Golf Glantangan	Ds. Pondokrejo, Tempurejo 20 km selatan kota	Wisata minat khusus
7.	Tropicana Butterfly	Ds. Garahan, Silo 30 km kota	Wisata minat khusus
8.	PTPN XI LOKO TOUR	Ds. Semboro, Semboro 45 km barat kota	Wisata alam, lori wisata kebun teh

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kesenian Kabupaten Jember, 2003

Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata dan Kesenian Kabupaten Jember, terjadi peningkatan pendapatan yang diperoleh dari sektor pariwisata. Pada tahun 2002, perolehan dari sektor pariwisata sebesar Rp 309.125.500,-, sedangkan pada tahun 2003 perolehan tersebut meningkat menjadi Rp 381.264.500,-. Berarti terjadi peningkatan sebesar 18,9 %. Peningkatan ini disebabkan dengan membaiknya kondisi perekonomian masyarakat pasca terjadinya krisis ekonomi.

Tabel 4.3 Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik maupun Mancanegara di Kabupaten Jember Tahun 2000-2003

	Tahun	Jumlah Pengunjung					
		Domestik	% naik/ turun	Manca negara	% naik/ turun	Jumlah	% naik/ turun
1.	Thn 2000	332.446	--	1.345	--	333.791	--
2.	Thn 2001	368.489	9,78%	2.153	37,5%	370.642	9,94%
3.	Thn 2002	355.584	3,5%	2.351	8,42%	357.935	3,43%
4.	Thn 2003	385.114	7,67%	2.223	5,44%	387.337	7,59%
Rata2 pengunjung		360.408,25		2018		362.426,25	

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kesenian Kabupaten Jember, 2004

Dilihat dari keseluruhan jumlah kunjungan wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara, terjadi fluktuasi atau naik turunnya jumlah kunjungan wisatawan. Pada tahun 2000, jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara berjumlah 333.791 wisatawan, meningkat pada tahun 2001 menjadi 37.642 wisatawan. Akan tetapi pada tahun 2002 terjadi penurunan jumlah kunjungan wisatawan sebesar 3,43 % atau menurun menjadi 357.935 wisatawan. Penurunan tersebut dikarenakan oleh bermacam-macam sebab, di antaranya adalah mewabahnya virus SARS, serta kondisi keamanan di Indonesia yang tidak memungkinkan untuk melakukan kunjungan wisata yang dibuktikan dengan terjadinya peristiwa meledaknya bom di Bali pada bulan Oktober 2002, yang menimbulkan dampak yang tidak baik di berbagai sektor. Kemudian pada tahun 2003 terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan sebesar 7,59 %, atau

meningkat menjadi 387.337 wisatawan (tabel 4.3). Dengan rata-rata jumlah kunjungan sebesar lebih dari 362.000 wisatawan per tahun, maka sektor pariwisata merupakan salah satu potensi pendapatan daerah yang perlu mendapat perhatian yang lebih baik.

4.2 Analisis Data

4.4.1 Hasil Pengumpulan Data

Aplikasi model *Analytic Hierarchy Process* (AHP) ini sedikit berbeda dengan metode penelitian survey pada umumnya. Proses adopsi pendapat dari responden dalam AHP tidak mensyaratkan jumlah minimum tertentu dari responden untuk mewakili suatu persepsi terhadap permasalahan, tetapi AHP hanya mensyaratkan yang berkompeten serta mewakili pengetahuan yang komprehensif terhadap permasalahan yang diangkat dan secara signifikan mempengaruhi pengambilan keputusan (Widi, 2002:51).

Berdasarkan identifikasi masalah dari responden yang terkait dengan masalah Pengembangan Sektor Pariwisata di Kabupaten Jember, maka input data yang diambil berasal dari berbagai pihak, yaitu: (1) Pihak akademisi atau pakar dari beberapa universitas di Kabupaten Jember dalam hal ini diwakili oleh Program D3 Pariwisata FISIP Universitas Jember, Akademi Pariwisata Universitas Muhammadiyah Jember, (2) Pihak pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten (BAPPEKAB) Jember, serta Dinas Pariwisata dan Kesenian Daerah (DISPARDA) Kabupaten Jember, (3) Pihak DPRD Kabupaten Jember, (4) Pihak praktisi atau pengelola obyek wisata di Kabupaten Jember.

Keterbatasan tenaga, waktu, dan sulitnya mencari responden yang mewakili standar kualifikasi dalam masalah ini, serta kesibukan dari pihak-pihak yang bersangkutan, menyebabkan kuesioner yang berhasil disebar hanya berjumlah 16 buah. Dari jumlah tersebut 11 di antaranya berhasil dikumpulkan kembali.

4.2.2 Hasil Perhitungan Data

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dan landasan teori yang digunakan sebagai alat untuk menjelaskan fenomena-fenomena empiris mengenai permasalahan Pengembangan Potensi Sektor Pariwisata di Kabupaten Jember, maka dapat disajikan pemecahan kompleksitas permasalahan dalam bentuk hirarki penentuan jenis potensi wisata di Kabupaten Jember. Hirarki yang ada ditanggapi oleh para responden sehingga menghasilkan data kualitatif yang dikuantisir. Data yang diperoleh kemudian dijadikan matriks *pairwise comparison* untuk setiap kelompok responden. Setelah di rata-rata geometri, data tersebut diolah dengan program *expert choice* untuk tujuan ketepatan dan kecepatan sehingga diketahui prioritas lokal (*local priority*) setiap level dan prioritas global (*global priority*) untuk masing-masing kelompok responden maupun responden secara keseluruhan.

4.2.2.1 Prioritas Kriteria Potensi Wisata di Kabupaten Jember

Kriteria-kriteria penentu potensi wisata di Kabupaten Jember pada hirarki level 1 dan level 2 merupakan hasil pengembangan dari teori-teori yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memfungsikan teori sebagai salah satu alat yang digunakan untuk menjelaskan fenomena-fenomena empiris dari suatu obyek yang diteliti.

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dengan menggunakan program *expert choice*, dapat diketahui bahwa kriteria ekonomi merupakan kriteria yang paling diprioritaskan untuk menentukan jenis potensi wisata. Hal ini dapat dilihat dari bobot nilai yang didapat kriteria ini adalah sebesar 0,5620. Setelah itu, kriteria infrastruktur menempati prioritas ke dua dengan bobot nilai sebesar 0,2535. Sementara itu, kriteria berikutnya ditempati oleh potensi wilayah yang menempati prioritas ke tiga dan kelembagaan pada prioritas ke empat. Kriteria potensi wilayah memperoleh bobot nilai sebesar 0,1247, sedangkan kelembagaan memperoleh nilai yang cukup kecil dan signifikan dibandingkan ketiga kriteria di atasnya yaitu dengan bobot nilai 0,0588 (tabel 4.4).

Hasil perhitungan dari hirarki level 2 yang merupakan hasil pendekomposisian dari level 1, juga menunjukkan adanya variasi nilai dari masing-masing kriteria tersebut (lihat lampiran 1). Pada sub kriteria yang termasuk dalam kategori kriteria ekonomi, kontribusi PAD merupakan sub kriteria yang memiliki prioritas paling tinggi dengan bobot nilai sebesar 0,2718, kemudian diikuti oleh sub kriteria kesempatan kerja pada prioritas ke dua dengan bobot nilai 0,1640. Serta sub kriteria *multiplier effect* pada prioritas ke tiga dengan bobot nilai 0,0666 dan nilai tambah dengan bobot nilai 0,0605 pada prioritas ke empat (tabel 4.4).

Pada kategori kriteria infrastruktur, sarana transportasi menduduki prioritas pertama dengan bobot nilai 0,0846, diikuti oleh jaringan air dan listrik pada prioritas ke dua dengan bobot nilai 0,0599 (lihat lampiran 1). Sedangkan untuk kedua kriteria lain dalam kategori infrastruktur yaitu penginapan dan akomodasi serta jaringan komunikasi berada pada prioritas ke tiga dan ke empat dengan bobot nilai yang tidak jauh berbeda. Penginapan dan akomodasi memiliki bobot nilai sebesar 0,0547, serta jaringan komunikasi dengan bobot nilai sedikit lebih kecil yaitu 0,0543 (tabel 4.4).

Empat kriteria lain yang termasuk dalam ruang lingkup kategori potensi wilayah, yaitu SDA, SDM, kondisi sosial dan kondisi budaya memiliki bobot nilai dalam kisaran yang tidak jauh berbeda yaitu antara 0,0134 sampai dengan 0,0591. SDA merupakan kriteria yang paling diprioritaskan dalam kategori potensi wilayah dengan bobot nilai sebesar 0,0591 yang diikuti oleh SDM pada prioritas ke dua dengan bobot nilai sebesar 0,0347. Kondisi sosial pada prioritas ke tiga dengan bobot nilai 0,0171, serta kriteria terakhir dalam kategori potensi wilayah ditempati oleh kondisi budaya dengan bobot nilai 0,0134 (tabel 4.4).

Hasil perhitungan yang sama juga terjadi pada empat kriteria terakhir yang termasuk dalam kategori kelembagaan yaitu keamanan dan kenyamanan, kelembagaan tradisional, kepastian hukum dan aturan main, serta regulasi pemerintah. Kriteria-kriteria tersebut memiliki selisih bobot nilai yang tidak terlalu besar dalam kisaran 0,0106 sampai dengan 0,0257. Pada kategori kelembagaan, keamanan dan kenyamanan merupakan prioritas teratas dengan bobot nilai sebesar

0,0257 yang diikuti oleh kriteria kelembagaan tradisional dengan bobot nilai 0,0114. Kemudian kriteria kepastian hukum dan aturan main menempati urutan ke tiga dengan bobot nilai sebesar 0,0110. Sedangkan regulasi pemerintah menempati prioritas terakhir dengan bobot nilai 0,0106 (tabel 4.4).

Tabel 4.4 Prioritas Penentu Jenis Potensi Wisata

Prioritas	Kriteria	Subkriteria	Bobot Nilai
I	Ekonomi	Kontribusi PAD	0,2718
		Kesempatan kerja	0,1640
		Multiplier effect	0,0666
		Nilai tambah	0,0605
II	Infrastruktur	Sarana transportasi	0,0846
		Jaringan air dan listrik	0,0599
		Penginapan dan akomodasi	0,0547
		Jaringan komunikasi	0,0543
III	Potensi Wilayah	S D A	0,0591
		S D M	0,0347
		Kondisi sosial	0,0171
		Kondisi budaya	0,0134
IV	Kelembagaan	Keamanan dan kenyamanan	0,0257
		Kelembagaan tradisional	0,0114
		Kepastian hukum dan aturan main	0,0110
		Regulasi pemerintah	0,0106

Sumber : Lampiran 1, diolah.

4.2.2.2 Prioritas Jenis Potensi Pariwisata

Hirarki level terbawah merupakan jenis-jenis potensi wisata yang berada di dalam wilayah Kabupaten Jember. Jenis-jenis potensi wisata tersebut diperoleh dengan berdasarkan pada kondisi geografis serta keadaan-keadaan alam yang ada di wilayah Kabupaten Jember, serta telah ditetapkan oleh Dinas Pariwisata dan Kesenian Kabupaten Jember. Wisata alam merupakan potensi wisata yang paling cocok dikembangkan di daerah Kabupaten Jember. Hal ini dapat dilihat dari kondisi serta daerah-daerah tujuan wisata yang pada umumnya bersumber daya dari keindahan alam. Sedangkan wisata buatan, wisata budaya, serta wisata minat khusus juga memiliki potensi untuk dikembangkan karena memiliki daya tarik tersendiri bagi para wisatawan.

Tabel 4.5 Prioritas Jenis Potensi Wisata Untuk Setiap Kriteria

Jenis Potensi Wisata	Kriteria			
	Ekonomi	Infrastruktur	Potensi Wilayah	Kelembagaan
Wisata Alam	0,5025	0,5520	0,4863	0,4814
Wisata Buatan	0,2027	0,1815	0,1806	0,1707
Wisata Budaya	0,1545	0,1270	0,1927	0,2103
Wista Minat Khusus	0,1277	0,1697	0,1448	0,1335

Sumber: Lampiran 2, diolah.

Dari tabel 4.5 dapat dijelaskan bahwa prioritas jenis potensi wisata yang didasarkan atas masing-masing kriteria (per kriteria) menunjukkan bahwa wisata alam merupakan jenis potensi wisata yang mutlak dan menjadi prioritas tertinggi (untuk setiap kriteria) sebagai potensi wisata yang paling cocok dikembangkan dengan bobot nilai di atas 0,5 (lihat lampiran 2). Hal ini dapat dilihat dari selisih

yang cukup besar antara bobot nilai antar potensi wisata alam dengan potensi wisata yang lainnya. Untuk setiap kriteria, wisata alam memperoleh bobot nilai yang cukup besar, yaitu antara 0,4814 untuk kriteria kelembagaan, sampai kriteria yang terbesar yaitu kriteria infrastruktur dengan bobot nilai 0,5520.

Pada jenis potensi wisata buatan, wisata budaya, serta wisata minat khusus menempati posisi berturut-turut kedua, ke tiga dan ke empat dengan selisih bobot nilai untuk setiap kriteria yang tidak terlampaui jauh. Wisata buatan berada pada prioritas ke dua, sedangkan wisata budaya berada pada prioritas ke tiga. Pada kategori ekonomi dan infrastruktur, wisata buatan unggul dengan selisih agak jauh yaitu 0,2027 dan 0,1815 dibandingkan pada kategori wisata budaya dengan masing bobot nilai 0,1545 dan 0,1270. Sedangkan pada kategori potensi wilayah dan kelembagaan, wisata buatan memiliki bobot nilai yang lebih kecil dari pada wisata budaya. Pada kategori tersebut wisata buatan mempunyai bobot nilai sebesar 0,1806 dan 0,1707, sedangkan wisata budaya memperoleh bobot nilai sebesar 0,1927 dan 0,2103.

Jenis potensi wisata yang menjadi prioritas terakhir (ke empat) adalah wisata minat khusus. Wisata minat khusus memiliki bobot nilai yang relatif kecil pada setiap kriterianya. Bobot nilai tertinggi yaitu sebesar 0,1697 terletak pada kriteria infrastruktur diikuti oleh kriteria potensi wilayah sebesar 0,1448. Kemudian untuk kriteria kelembagaan bobot nilainya adalah 0,1335, terakhir adalah kriteria ekonomi dengan bobot nilai terkecil yaitu 0,1277.

Sintesis akhir menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan hasil di atas. Berdasarkan pertimbangan atas seluruh kriteria (*global priority*), dapat diketahui bahwa jenis potensi wisata alam memiliki potensi yang paling besar (mutlak) dibandingkan dengan potensi wisata yang lainnya (tabel 4.6). Selisih bobot nilai potensi wisata alam dengan potensi wisata lainnya cukup besar, yaitu hampir mendekati 0,4. Sebagai prioritas pertama, wisata alam memiliki bobot nilai sebesar 0,5027. Sedangkan pada tiga jenis potensi lainnya memiliki selisih bobot nilai yang kecil antara satu dengan lainnya, yaitu dengan rata-rata selisih sebesar 0,02. Prioritas ke dua yaitu wisata buatan dengan bobot nilai sebesar 0,1870, kemudian diikuti oleh potensi wisata budaya dengan bobot nilai 0,1689

pada posisi ke tiga. Sedangkan wisata minat khusus merupakan prioritas terakhir dengan bobot nilai sebesar 0,1415 (tabel 4.6).

Tabel 4.6 Prioritas Jenis Potensi Wisata Berdasarkan Pertimbangan Seluruh Kriteria

Prioritas	Jenis Potensi Wisata	Bobot Nilai
I	Wisata Alam	0,5027
II	Wisata Buatan	0,1870
III	Wisata Budaya	0,1689
IV	Wisata Minat Khusus	0,1415

Sumber : Lampiran 3

4.3 Pembahasan Hasil Perhitungan

Usaha pembangunan dan upaya perubahan struktural dapat mencakup perubahan ekonomi dengan diversifikasi pertanian, pengembangan produksi ekstraktif (pertambangan dan kehutanan), pengembangan industri sekunder (manufaktur dan konstruksi), dan kegiatan sektor tersier (jasa-jasa dan kepariwisataan), serta penciptaan lapangan pekerjaan produktif di bidang-bidang kegiatan yang meluas. Maka untuk mewujudkan upaya-upaya tersebut pemerintah harus menerapkan kebijakan yang tepat dan menguntungkan (Djojohadikusumo, 1994:xvii).

Berdasarkan hirarki yang telah disusun dan dijelaskan sebelumnya, hasil sintesis mengenai pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Jember menunjukkan bahwa prioritas utama pengembangan pariwisata di Kabupaten Jember adalah pengembangan pada jenis potensi wisata alam, prioritas yang ke dua adalah jenis wisata buatan, prioritas yang ke tiga adalah wisata budaya, serta prioritas terakhir adalah jenis wisata minat khusus. Hasil sintesis global menunjukkan bahwa selisih bobot nilai antar prioritas pertama dengan prioritas ke dua cukup besar. Bobot nilai pada prioritas pertama (wisata alam), adalah sebesar 0,5027. Sedangkan prioritas berikutnya berturut-turut untuk wisata buatan, wisata budaya, dan wisata minat khusus adalah sebesar 0,1870, 0,1689, dan 0,1415. Hasil

sintesis per kriteria juga mengindikasikan hal yang tidak jauh berbeda. Potensi wisata alam memperoleh bobot nilai yang cukup besar untuk dua kriteria terpenting (ekonomi serta infrastruktur) yaitu sebesar 0,5025 dan 0,5520. Sedangkan bobot nilai potensi wisata alam untuk kriteria potensi wilayah dan kelembagaan adalah sebesar 0,4863 dan 0,4814.

Berdasarkan hasil telah diperoleh di atas dapat mengindikasikan bahwa jenis potensi wisata alam, secara teori seperti halnya yang dikemukakan oleh Perroux, memiliki keunggulan dalam hal faktor penentu dan faktor pendorong. Faktor penentu adalah faktor-faktor yang terdapat dibalik *supply demand*, di mana dalam hal ini yang termasuk faktor penentu adalah kesempatan kerja, kontribusi PAD, nilai tambah, *multiplier effect*, sarana transportasi, jaringan komunikasi, penginapan dan akomodasi, jaringan air dan listrik, SDA serta SDM. Sedangkan faktor pendorong adalah faktor-faktor yang ikut secara positif mendorong perkembangan daerah tetapi di luar faktor-faktor penentu, dalam hal ini adalah regulasi pemerintah, kepastian hukum dan aturan main, keamanan dan kenyamanan, kelembagaan tradisional, kondisi sosial serta kondisi budaya.

Menurut Perroux, suatu wilayah yang memiliki kelebihan pada faktor penentu dan faktor pendorong akan lebih cepat berkembang dari pada wilayah lain, karena faktor-faktor tersebut akan mendorong terjadinya proses aglomerasi dan kelimpahan faktor modal sehingga cenderung menjadi pusat pertumbuhan. Sedangkan daerah-daerah lain yang kurang memiliki faktor-faktor ini sebagian akan menjadi sebaliknya. Daerah-daerah maju yang menjadi pusat pertumbuhan akan memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) pada spesialisasi hasil-hasil tertentu, dalam hal ini bidang kepariwisataan dan daerah-daerah yang lain akan menghasilkan keunggulan komparatif untuk hasil-hasil lainnya.

Sektor pariwisata di Kabupaten Jember memiliki keunggulan komparatif. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, keunggulan komparatif pengembangan potensi wisata alam tersebut hendaknya menjaddi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Jember. Kebijakan pembangunan daerah seharusnya didasarkan pada kelimpahan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh suatu daerah serta didasarkan oleh permintaan.

Menurut Michael Portier (neo klasik muda), suatu daerah bila ingin berkembang harus menghasilkan produk-produk yang pada umurnya diminati dan memiliki keunggulan bersaing. Dalam artian bahwa suatu daerah dipandang tidak perlu menghasilkan sendiri semua barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan, tetapi suatu daerah diminta untuk menghasilkan sendiri barang-barang atau jasa-jasa yang diminta oleh pasar dan didukung oleh kelimpahan faktor produksi.

Penjelasan dan pemaparan di atas setidaknya dapat memberikan suatu gambaran bahwa kebijakan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Jember sebaiknya ditujukan pada pengembangan jenis potensi wisata alam, melihat dari besarnya potensi yang dimiliki oleh potensi wisata tersebut. Karena dengan mewujudkan hal tersebut dapat memberikan manfaat yang sangat besar yang dapat mendukung perkembangan industri pariwisata di Kabupaten Jember. Di mana hasil penelitian dapat diketahui bahwa kontribusi PAD dan kesempatan kerja merupakan kriteria-kriteria yang paling penting dalam mendukung berhasilnya perkembangan industri pariwisata di Kabupaten Jember.

Hal ini sesuai dengan pandangan kaum strukturalis yang menyatakan bahwa pembangunan yang dilakukan seharusnya menciptakan keseimbangan antar sektor. Dasar pemikiran dari kaum strukturalis adalah bahwa tidak mungkin suatu sektor berdiri sendiri tanpa adanya dukungan dari sektor lain, sehingga menurut penganut pemikiran ini, pembangunan yang dilakukan seharusnya secara serentak agar terbentuk suatu sistem yang mampu menciptakan keterkaitan antar sektor.

Menurut seorang pengikut strukturalis (Hirschman), dalam membangun suatu perekonomian, investasi hendaknya diarahkan pada sektor-sektor terpilih agar menciptakan nilai tambah yang lebih besar. Hirschman berpendapat bahwa investasi pada sektor-sektor perekonomian yang strategis akan menghasilkan kesempatan investasi baru dan membukakan jalan bagi pembangunan ekonomi lebih lanjut. Pembangunan memang harus berlangsung dalam cara ini, dengan pertumbuhan yang menjalar dari sektor utama ke sektor pendukungnya. Hirschman juga menganggap bahwa pembangunan sebagai rantai disequilibrium yang harus dipertahankan dari pada dihapuskan.

Jika perekonomian diinginkan tetap berlangsung maka tugas kebijaksanaan pembangunan adalah memelihara tensi, disposisi, dan disequilibrium tersebut, di mana cara ini ditempuh dengan menanamkan modal di bidang *over head social* atau kegiatan produktif langsung. Kebijakan pembangunan daerah harus dilandasi dengan pengetahuan atas kondisi sosial ekonomi masyarakat termasuk potensi, permasalahan, dan kemungkinan-kemungkinannya, serta harus diselaraskan dengan struktur dasar masing-masing daerah. Kebijakan tersebut perlu dibuat terlebih dahulu untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu pemerintah daerah dan masyarakat harus mampu menaksir potensi sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah (Arsyad, 1997: 274).

Perbedaan faktor-faktor antar daerah merupakan suatu pembuktian bahwa daerah-daerah seharusnya membangun fungsi produksi berdasarkan kelimpahan faktor-faktor produksi yang dimiliki sendiri. Menurut Chenery-Ohlin, upaya-upaya membangun fungsi produksi tersebut adalah dengan membangun keseluruhan kapasitas produksi daerah terutama kapasitas sektor-sektor domestik, infrastruktur dan *public utilities* maupun sektor-sektor lokal lainnya. Maka dalam konteks inilah pengembangan potensi wisata alam merupakan hal yang sangat penting dalam perkembangan sektor pariwisata khususnya, serta mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan perekonomian Kabupaten Jember pada umumnya. Karena dengan perencanaan yang tepat pengembangan potensi wisata dapat memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi penerimaan daerah Kabupaten Jember.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan disajikan kesimpulan yang didasarkan pada analisis data dan pembahasannya. Di samping itu, atas dasar kesimpulan yang disajikan dapat diperoleh beberapa saran mengenai pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Jember.

5.1 Kesimpulan

Hasil sintesis hirarki mengenai pengembangan sektor pariwisata, di Kabupaten Jember menunjukkan bahwa berdasarkan kriteria ekonomi, infrastruktur, potensi wilayah, serta kelembagaan, yang menjadi prioritas tertinggi adalah pengembangan jenis potensi wisata alam dengan bobot nilai sebesar 0,5027. Hal ini menunjukkan bahwa wisata alam merupakan potensi wisata yang paling cocok untuk dikembangkan di Kabupten Jember.

Pariwisata dapat dijadikan sebagai alternatif sumber pendapatan daerah karena sumber potensi pendapatan daerah lainnya seperti migas dan non migas lainnya (pertanian, hasil hutan dan aneka tambang) sudah tidak dapat diandalkan lagi. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya sumberdaya-sumberdaya yang ada. Di samping itu, infrastruktur untuk membangun industri pariwisata sangat fleksibel.

Pengembangan suatu jenis potensi wisata yang akan dilakukan harus melihat semua potensi baik yang ada di lingkungannya sendiri maupun faktor eksternal yang ada. Karena pengembangan potensi wisata tersebut selain akan menunjang program-program wisata daerah, juga dapat memberikan keuntungan bagi pemasukan pendapatan daerah dalam sektor pariwisata atau juga dimaksudkan agar subsidi dari pariwisata ini minimal dapat membiayai kelangsungan pengembangan sektor pariwisata itu sendiri.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, dapat disajikan beberapa saran yang mungkin dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, swasta dan peneliti lain, yaitu:

1. Pemerintah daerah hendaknya lebih mengutamakan pengembangan sector pariwisata terutama pada pengembangan potensi obyek wisata alam.
2. Perlunya diadakan kajian yang lebih mendalam mengenai seberapa besar potensi dan prospek yang dimiliki oleh masing-masing obyek wisata, sebelum pola dan strategi pengembangan pariwisata diumumkan
3. Pemerintah daerah perlu membuat peraturan yang jelas tentang pengelolaan obyek wisata antara pemerintah daerah dan swasta, serta bentuk-bentuk kerja sama antara pemerintah daerah dan swasta.



DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 1997. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: BPSTIE YKPN.
- Asmuji. 2003. *Perkembangan Industri Pariwisata Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan PAD di Jawa Timur*. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. FKIP UNEJ, Volume 4 No. 2.
- Azis, Iwan Jaya. 1994. *Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: LPFE UI.
- Dinas Pariwisata dan Kesenian. 2004. *Potensi Obyek Wisata Yang Telah Dikembangkan di Kabupaten Jember*. Kabupaten Jember.
- , 2004. *Data Potensi Wisata Kabupaten Jember*. Kabupaten Jember.
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1994. *Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- , 1995. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: PT Pembangunan.
- Irawan dan Suparmoko. 1990. *Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: BPFE.
- Jhingan, M.L. 2003. *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muharso, Urip. 2004. *Peranan Sumber Daya Manusia Dalam Pembangunan*. Jember.
- Mukaromah. 2000. *Analisis Penerapan Sektor Prioritas di Kabupaten Jember*. Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Skripsi. Tidak Dipublikasikan.
- Nugraha, R. Aga. 2000. *Alternatif Prioritas Kebijakan Pembangunan Dalam Pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 di Kabupaten Jember, Penerapan Analytic Hierarchy Process*. Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Skripsi. Tidak Dipublikasikan.
- Pandia, Agnes Swetta. "Industri Pariwisata, Bangkitlah Jangan Cuma Mengeluh". Jakarta: Kompas. 8 Mei 2003.
- Saaty, Thomas L. 1993. *Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin, Proses Hirarki Untuk Pengambilan Keputusan Dalam Situasi Yang Kompleks*. Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo.

- Sandy, Widy T. 2002. *Performasi dan Pengembangan Human Development di Jawa Timur Dengan Pendekatan Analytic Hierarchy Process, Studi Kasus Kabupaten Jember*. Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Skripsi. Tidak Dipublikasikan.
- Spillane, James J. 1998. *Pariwisata Indonesia, Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- . 1991. *Ekonomi Pariwisata, Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sukirno, Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: LPFE UI.
- Sulistiyanti. 2000. *Penentuan Lokasi Dengan Menerapkan Analytic Hierarchy Process (AHP)*. Jurnal Ekonomi dan Manajemen. Volume 1 No. 1.
- Suryabrata, S. 1991. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Suwantoro, Gamal. 2001. *Dasar-dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- Yoeti, Oka A. 1997. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Lampiran 1. Hasil Sintesis Prioritas Pengembangan Jenis Potensi Pariwisata Di Kabupaten Jember

Kriteria	Subkriteria	Sthd 1	Sthd 2	Sthd 3	Sthd 4	Sthd 5	Sthd 6	Sthd 7	Sthd 8	Sthd 9	Sthd 10	Sthd 11	Rata-rata
Ekonomi	Kont. PAD	0,565	0,316	0,592	0,524	0,565	0,581	0,565	0,545	0,560	0,565	0,565	0,5620
	Ksmp.kerja	0,316	0,316	0,185	0,303	0,220	0,320	0,316	0,215	0,216	0,316	0,267	0,2718
	Multi.effeci	0,141	0,123	0,326	0,128	0,171	0,127	0,141	0,166	0,171	0,141	0,169	0,1640
	Nilai tambah	0,054	0,062	0,037	0,041	0,101	0,068	0,054	0,096	0,068	0,101	0,054	0,0605
		0,262	0,262	0,162	0,275	0,262	0,246	0,262	0,270	0,264	0,262	0,262	0,2535
Infrastruktur	Transportasi	0,098	0,081	0,081	0,101	0,061	0,077	0,0148	0,063	0,099	0,061	0,061	0,0846
	Air&listrik	0,033	0,081	0,018	0,033	0,092	0,077	0,014	0,94	0,33	0,092	0,092	0,0547
	Penginapan	0,033	0,037	0,036	0,101	0,032	0,033	0,069	0,034	0,098	0,032	0,032	0,0543
	Komunikasi	0,033	0,063	0,027	0,040	0,077	0,059	0,031	0,079	0,034	0,077	0,077	0,0599
Potensi Wilayah	SDA	0,118	0,118	0,181	0,131	0,118	0,110	0,118	0,122	0,120	0,118	0,118	0,1247
	SDM	0,066	0,062	0,106	0,069	0,053	0,060	0,029	0,054	0,032	0,066	0,053	0,0591
	Sosial	0,031	0,007	0,051	0,034	0,041	0,005	0,066	0,042	0,033	0,031	0,041	0,347
	Budaya	0,014	0,030	0,012	0,018	0,012	0,028	0,011	0,013	0,024	0,014	0,012	0,0171
Kelembagaan		0,006	0,018	0,012	0,010	0,012	0,016	0,011	0,013	0,031	0,006	0,012	0,0134
		0,055	0,055	0,065	0,070	0,055	0,063	0,055	0,063	0,056	0,055	0,055	0,0588
	Kemamanan	0,029	0,016	0,037	0,032	0,024	0,018	0,029	0,026	0,023	0,023	0,026	0,0257
	Tradisional	0,004	0,024	0,009	0,008	0,017	0,026	0,004	0,019	0,005	0,004	0,005	0,0106
	Hukum	0,011	0,008	0,013	0,015	0,005	0,010	0,011	0,007	0,016	0,016	0,009	0,0110
Regulasi	0,011	0,007	0,007	0,015	0,009	0,009	0,011	0,009	0,012	0,01	0,015	0,0114	

Sumber: Data penelitian, diolah

Lampiran 2. Pengembangan Jenis Potensi Pariwisata untuk Setiap Kriteria

Kriteria	STHD	Potensi Wisata			
		Alam	Buatan	Budaya	Minat Khusus
Ekonomi	Sthd 1	0,565	0,262	0,101	0,071
	Sthd 2	0,464	0,198	0,198	0,198
	Sthd 3	0,532	0,176	0,142	0,150
	Sthd 4	0,586	0,263	0,090	0,059
	Sthd 5	0,632	0,115	0,120	0,135
	Sthd 6	0,458	0,200	0,200	0,140
	Sthd 7	0,460	0,262	0,065	0,209
	Sthd 8	0,646	0,110	0,120	0,130
	Sthd 9	0,475	0,171	0,245	0,113
	Sthd 10	0,405	0,241	0,258	0,099
	Sthd 11	0,503	0,232	0,161	0,101
	Rata-rata	0,5205	0,2027	0,1545	0,1277
Infrastruktur	Sthd 1	0,557	0,164	0,095	0,191
	Sthd 2	0,553	0,129	0,103	0,221
	Sthd 3	0,586	0,136	0,154	0,117
	Sthd 4	0,545	0,171	0,102	0,185
	Sthd 5	0,527	0,145	0,168	0,156
	Sthd 6	0,573	0,122	0,094	0,220
	Sthd 7	0,561	0,183	0,065	0,191
	Sthd 8	0,519	0,148	0,170	0,159
	Sthd 9	0,411	0,337	0,157	0,091
	Sthd 10	0,364	0,370	0,155	0,111
	Sthd 11	0,546	0,092	0,134	0,225
	Rata-rata	0,5220	0,1815	0,1270	0,1697
Potensi Wilayah	Sthd 1	0,551	0,178	0,203	0,089
	Sthd 2	0,423	0,212	0,204	0,169
	Sthd 3	0,586	0,110	0,254	0,061
	Sthd 4	0,534	0,191	0,191	0,092
	Sthd 5	0,517	0,201	0,180	0,102
	Sthd 6	0,423	0,210	0,205	0,164
	Sthd 7	0,517	0,178	0,153	0,136
	Sthd 8	0,508	0,204	0,181	0,107
	Sthd 9	0,333	0,167	0,208	0,300
	Sthd 10	0,440	0,135	0,161	0,271
	Sthd 11	0,517	0,201	0,180	0,102
	Rata-rata	0,4363	0,1806	0,1927	0,1448

Lampiran 2. Lanjutan

Kriteria	STHD	Potensi Wisata			
		Alam	Buatan	Budaya	Minat Khusus
Kelembagaan	Sthd 1	0,527	0,200	0,200	0,064
	Sthd 2	0,464	0,164	0,245	0,127
	Sthd 3	0,492	0,123	0,201	0,184
	Sthd 4	0,457	0,200	0,214	0,100
	Sthd 5	0,436	0,109	0,255	0,200
	Sthd 6	0,449	0,175	0,233	0,135
	Sthd 7	0,436	0,291	0,146	0,127
	Sthd 8	0,413	0,119	0,262	0,206
	Sthd 9	0,557	0,160	0,194	0,089
	Sthd 10	0,573	0,155	0,163	0,109
	Sthd 11	0,491	0,182	0,200	0,127
	Rata-rata	0,4814	0,1707	0,2103	0,1335

Sumber: Data penelitian, diolah

Lampiran 3. Hasil Sintesis Global Prioritas Pengembangan Jenis Potensi Pariwisata Berdasarkan Pertimbangan Seluruh Kriteria

STHD	Potensi Wisata			
	Alam	Buatan	Budaya	Minat Khusus
Sthd 1	0,559	0,221	0,118	0,102
Sthd 2	0,472	0,145	0,187	0,197
Sthd 3	0,549	0,152	0,169	0,131
Sthd 4	0,560	0,224	0,115	0,101
Sthd 5	0,580	0,128	0,151	0,141
Sthd 6	0,470	0,169	0,188	0,173
Sthd 7	0,493	0,234	0,082	0,191
Sthd 8	0,580	0,128	0,152	0,140
Sthd 9	0,389	0,214	0,274	0,123
Sthd 10	0,361	0,258	0,259	0,122
Sthd 11	0,517	0,184	0,163	0,136
Rata-rata	0,5027	0,1870	0,1689	0,1415

Sumber: Lampiran 2, diolah

Lampiran 4

Kepada YTH,
Bapak/Ibu Responden
Di tempat

Dengan hormat,

Tujuan penelitian ini adalah berusaha menangkap aspirasi dari para ahli (*expert*) dan pemegang kebijakan (*policy maker*) mengenai potensi pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Jember. Karena Bapak/Ibu kami anggap sebagai ahli dalam masalah tersebut, maka kesediaan Bapak/Ibu merupakan bantuan yang sangat berarti terhadap hasil penelitian ini.

Pengisian kuesioner ini merupakan salah satu tahapan penelitian untuk mengetahui secara kualitatif yang diberikan bobot kuantitatif terhadap potensi pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Jember. Kuesioner ini merupakan bahan penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi dengan judul **“Pengembangan Sektor Pariwisata di Kabupaten Jember (Pendekatan *Analytic Hierarchy Process/AHP*)”**.

Kesungguhan dan pengetahuan dalam mengisi kuesioner ini menjadikan hasil penelitian ini memiliki validitas yang tinggi sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Jember. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi dan mengembalikan kuesioner ini. Semoga sejahtera dan sukses selalu menyertai Bapak/Ibu.

Jember, April 2005

Hormat kami,

Peneliti
(Agung Sudilaksono)

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

Metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) memiliki kuesioner yang berbeda dari metode penelitian lain. Kuesioner pada penelitian ini mencoba menangkap persepsi para ahli (*expert*) atau pemegang kebijakan (*policy maker*) di bidang atau permasalahan yang diteliti. Berikut ini adalah petunjuk pengisian kuesioner penelitian ini:

Bapak/Ibu hanya diminta untuk menjawab pertanyaan dengan cara **membandingkan secara berpasangan** setiap kriteria terhadap kriteria lain yang sehubungan dengan tujuan penelitian. Perbandingan antara dua-elemen kriteria tersebut menggunakan skala preferensi (penilaian) sebagai berikut:

Skala	Definisi	Keterangan
1	<u>Sama</u> pentingnya	A dan B <u>sama</u> pentingnya
3	<u>Sedikit lebih</u> penting	A <u>sedikit lebih</u> penting dibanding B
5	<u>Agak lebih</u> penting	A <u>agak lebih</u> penting dibanding B
7	<u>Jauh lebih</u> penting	A <u>jauh lebih</u> penting dibanding B
9	<u>Mutlak lebih</u> penting	A <u>mutlak lebih</u> penting dibanding B
2, 4, 6, 8	Nilai-nilai antara	Jika ragu-ragu dalam memilih skala, (misalkan skala 6 untuk skala 5 dan 7)
Resiprokal	Jika A dibanding B adalah, katakanlah, skala 7, maka B dibanding A adalah skala $\frac{1}{7}$	Asumsi yang masuk akal

Contoh:

Misalkan kita akan membeli sebuah mobil, maka ada beberapa kriteria yang menentukan, yaitu:

- A. Model
- B. Keandalan Mesin
- C. Efisiensi bahan bakar

Bentuk dan cara menjawab pertanyaan tersebut adalah dengan menandai skala-skala yang sudah disediakan. Adapun contohnya adalah sebagai berikut:

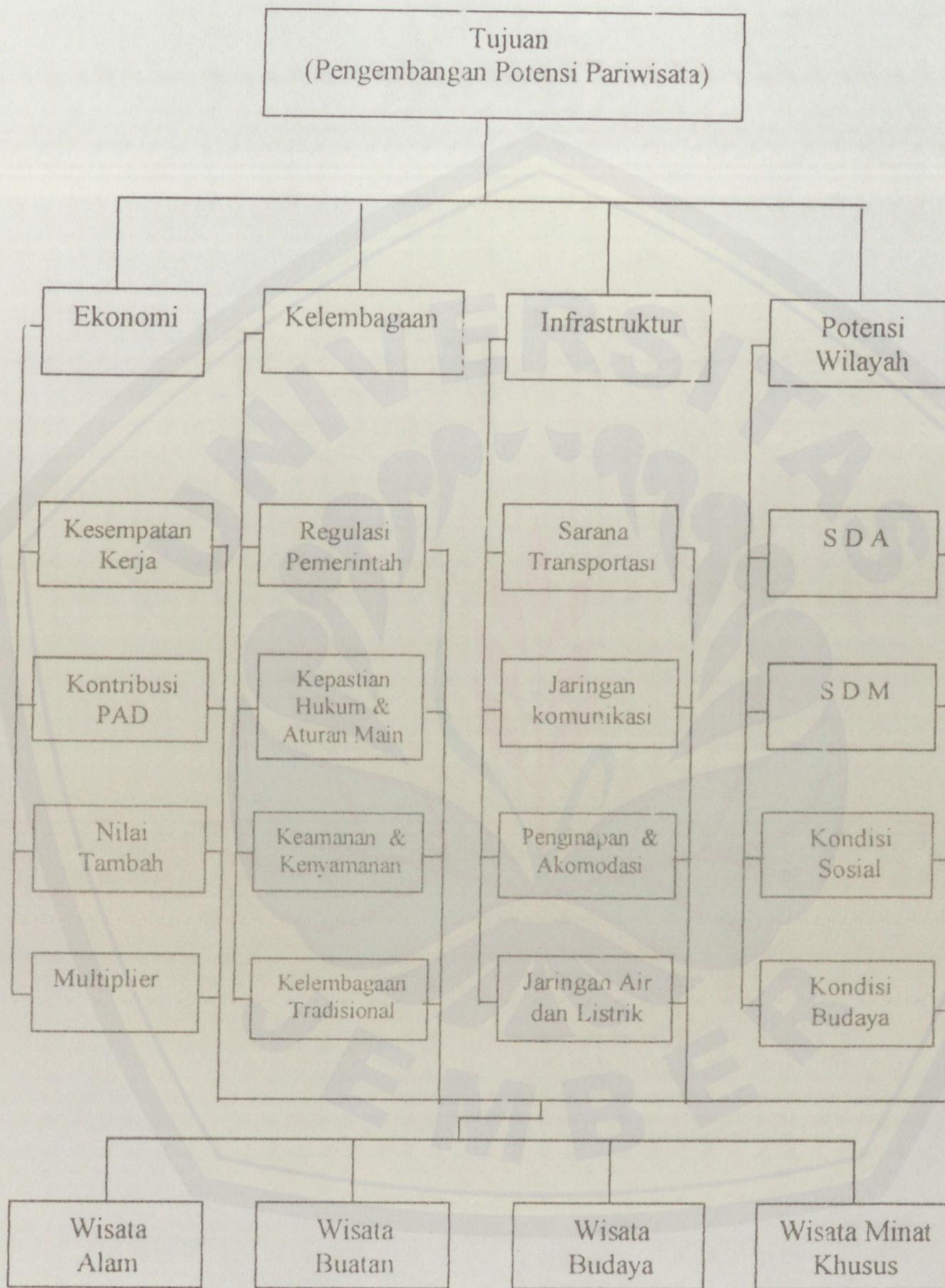
PERTANYAAN: Jika anda ingin membeli sebuah mobil, kriteria manakah yang paling diprioritaskan dalam memilih mobil ?

Model (A)	9 7 5 3 1 3 (5) 7 9	Keandalan Mesin (B)
Model (A)	9 7 5 (3) 1 3 5 7 9	Efisiensi bahan bakar (C)
Keandalan Mesin (B)	9 7 5 3 (1) 3 5 7 9	Efisiensi bahan bakar (C)

Keterangan dan maksud jawaban:

1. Keandalan mesin (B) agak lebih penting dibanding model (A).
2. Model (A) sedikit lebih penting dibanding efisiensi bahan bakar (C).
3. Keandalan mesin (B) sama pentingnya dengan efisiensi bahan bakar (C).

DIAGRAM HIRARKI PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA



KETERANGAN DIAGRAM

Hirarki Level 1:

Kriteria pengembangan potensi wisata:

1. Ekonomi : Keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari pengembangan potensi pariwisata
2. Kelembagaan : Adanya lembaga-lembaga serta peraturan-peraturan yang mengatur serta bertanggungjawab dalam pengelolaan suatu potensi pariwisata
3. Infrastruktur : Ketersediaan sarana dan prasarana pada suatu wilayah yang mendukung perkembangan potensi pariwisata
4. Potensi wilayah : Keunggulan-keunggulan yang dimiliki suatu wilayah yang mendukung perkembangan wisata

Hirarki Level 2:

Sub kriteria level 1:

1. Kesempatan Kerja : Ketersediaan lapangan kerja yang diciptakan oleh pengembangan potensi wisata
2. Kontribusi PAD : Besarnya pemasukan daerah yang diperoleh dari pengembangan potensi wisata
3. Nilai Tambah : Adanya nilai tambah di sektor lain yang ditimbulkan dari pengembangan potensi wisata
4. Multiplier effect : Dampak-dampak lain yang diakibatkan oleh pengembangan potensi wisata
5. Regulasi Pemerintah : Adanya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengelola suatu potensi wisata
6. Kepastian Hukum & Aturan Main : Adanya status hukum yang jelas pada suatu potensi wisata
7. Keamanan & Kenyamanan : Keadaan suatu potensi wisata yang menjamin keamanan serta kenyamanan para wisatawan
8. Kelembagaan Tradisional : Adanya lembaga tradisional yang mengatur adat istiadat suatu potensi wisata

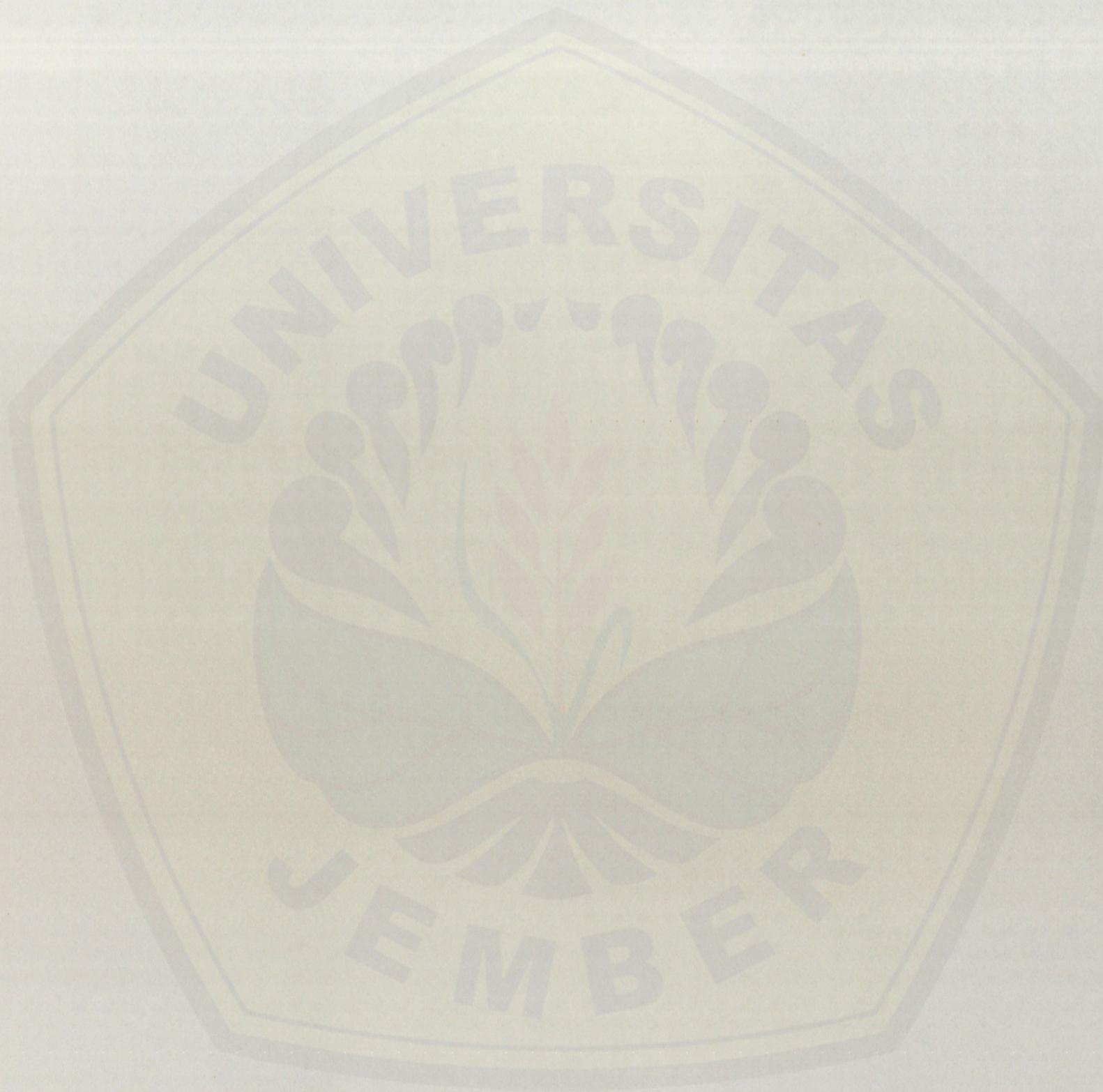
9. Sarana transportasi : Ketersediaan jalur-jalur serta alat-alat transportasi yang memudahkan mobilitas
10. Jaringan komunikasi : Ketersediaan sarana dan prasarana pada suatu lokasi wisata yang mempermudah komunikasi
11. Sarana penginapan : Ketersediaan serta fasilitas penginapan pada suatu lokasi wisata
12. Jaringan air dan listrik : Ketersediaan sarana dan prasarana pada suatu lokasi wisata yang memudahkan untuk memperoleh air bersih dan jaringan listrik
13. S D A : Keadaan sumberdaya alam pada suatu lokasi wisata (keindahan, kebersihan, ketenangan)
14. S D M : Adanya tenaga-tenaga trampil dan berpengalaman dalam mengelola potensi wisata
15. Kondisi sosial : Keadaan sosial masyarakat sekitar di lingkungan lokasi wisata
16. Kondisi budaya : Kondisi budaya masyarakat sekitar lokasi wisata

Hirarki Level 3:

Alternatif potensi wisata:

1. Wisata Alam : Alternatif potensi wisata yang mengandalkan daya tarik keindahan alam untuk menarik pengunjung, contoh: Pantai Watu Ulo dan Papuma, Lereng Gunung Raung, Air Terjun Tancak, dsb.
2. Wisata Buatan : Alternatif potensi wisata yang merupakan hasil pengembangan manusia, contohnya: Pemandian Rembangan, Pemandian Kebon Agung, dsb.
3. Wisata Budaya : Alternatif potensi wisata yang merupakan hasil kebudayaan warisan leluhur, contohnya: Pesangrahan Juk Zhedep (Desa Panduman-Jelbuk), Goa Pertapaan (Desa Sucopangepok-Jelbuk), dsb.

4. Wisata Minat Khusus : Alternatif potensi wisata yang dapat digunakan sebagai kegiatan-kegiatan tertentu, seperti penelitian dan pengamatan, contohnya: Tamar. Nasional Meru Betiri, Taman Kupu-kupu (Tropicana Butterfly).



KUESIONER

I. Prioritas Kriteria Pengembangan Potensi Wisata

Untuk menentukan potensi wisata, diperlukan kriteria-kriteria tertentu sebagai pedoman penentuan pengembangan potensi wisata.

Menurut Bapak/Ibu, kriteria manakah yang menjadi prioritas dalam menentukan potensi pengembangan wisata di Kabupaten Jember.

Ekonomi	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Kelembagaan
Ekonomi	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Infrastruktur
Ekonomi	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Potensi wilayah
Kelembagaan	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Infrastruktur
Kelembagaan	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Potensi wilayah
Infrastruktur	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Potensi wilayah

EKONOMI

II. Prioritas Kebijakan Ekonomi

Menurut Bapak/Ibu, kebijakan ekonomi manakah yang menjadi prioritas dalam menentukan potensi pengembangan pariwisata di Kabupaten Jember.

Kesempatan kerja	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Kontribusi PAD
Kesempatan kerja	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Nilai tambah
Kesempatan kerja	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Multiplier effect
Kontribusi PAD	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Nilai tambah
Kontribusi PAD	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Multiplier effect
Nilai tambah	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Multiplier effect

III. Prioritas potensi wisata berdasarkan kesempatan kerja

Menurut Bapak/Ibu, potensi wisata manakah yang menjadi prioritas pilihan sebagai potensi wisata yang tepat berdasarkan kesempatan kerja.

Wisata alam	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata buatan
Wisata alam	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata budaya
Wisata alam	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata minat khusus
Wisata buatan	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata budaya
Wisata buatan	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata minat khusus
Wisata budaya	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata minat khusus

IV. Prioritas potensi wisata berdasarkan kontribusi PAD

Menurut Bapak/Ibu, potensi wisata manakah yang menjadi prioritas pilihan sebagai potensi wisata yang tepat berdasarkan kontribusi PAD.

Wisata alam	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata buatan
Wisata alam	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata budaya
Wisata alam	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata minat khusus
Wisata buatan	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata budaya
Wisata buatan	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata minat khusus
Wisata budaya	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata minat khusus

V. Prioritas potensi wisata berdasarkan nilai tambah

Menurut Bapak/Ibu, potensi wisata manakah yang menjadi prioritas pilihan sebagai potensi wisata yang tepat berdasarkan nilai tambah.

Wisata alam	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata buatan
Wisata alam	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata budaya
Wisata alam	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata minat khusus
Wisata buatan	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata budaya
Wisata buatan	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata minat khusus
Wisata budaya	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata minat khusus

VI. Prioritas potensi wisata berdasarkan *multiplier effect*

Menurut Bapak/Ibu, potensi wisata manakah yang menjadi prioritas pilihan sebagai potensi wisata yang tepat berdasarkan multiplier effect.

Wisata alam	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata buatan
Wisata alam	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata budaya
Wisata alam	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata minat khusus
Wisata buatan	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata budaya
Wisata buatan	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata minat khusus
Wisata budaya	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata minat khusus

KELEMBAGAAN

VII. Prioritas Kelembagaan

Menurut Bapak/Ibu, kelembagaan manakah yang menjadi prioritas dalam menentukan potensi pengembangan pariwisata di Kabupaten Jember.

Regulasi pemerintah	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Kepastian hukum & aturan main
Regulasi pemerintah	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Keamanan & kenyamanan
Regulasi pemerintah	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Kelembagaan tradisional
Kepastian hukum & aturan main	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Keamanan & kenyamanan
Kepastian hukum & aturan main	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Kelembagaan tradisional
Keamanan&kenyamanan	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Kelembagaan tradisional

VIII. Prioritas potensi wisata berdasarkan regulasi pemerintah

Menurut Bapak/Ibu, potensi wisata manakah yang menjadi prioritas pilihan sebagai potensi wisata yang tepat berdasarkan regulasi pemerintah.

Wisata alam	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata buatan
Wisata alam	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata budaya

Wisata alam	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata minat khusus
Wisata buatan	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata budaya
Wisata buatan	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata minat khusus
Wisata budaya	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata minat khusus

IX. Prioritas potensi wisata berdasarkan kepastian hukum dan aturan main

Menurut Bapak/Ibu, potensi wisata manakah yang menjadi prioritas pilihan sebagai potensi wisata yang tepat berdasarkan kepastian hukum dan aturan main.

Wisata alam	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata buatan
Wisata alam	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata budaya
Wisata alam	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata minat khusus
Wisata buatan	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata budaya
Wisata buatan	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata minat khusus
Wisata budaya	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata minat khusus

X. Prioritas potensi wisata berdasarkan keamanan dan kenyamanan

Menurut Bapak/Ibu, potensi wisata manakah yang menjadi prioritas pilihan sebagai potensi wisata yang tepat berdasarkan keamanan dan kenyamanan.

Wisata alam	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata buatan
Wisata alam	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata budaya
Wisata alam	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata minat khusus
Wisata buatan	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata budaya
Wisata buatan	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata minat khusus
Wisata budaya	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata minat khusus

XI. Prioritas potensi wisata berdasarkan kelembagaan tradisional

Menurut Bapak/Ibu, potensi wisata manakah yang menjadi prioritas pilihan sebagai potensi wisata yang tepat berdasarkan kelembagaan tradisional.

Wisata alam	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata buatan
Wisata alam	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata budaya
Wisata alam	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata minat khusus
Wisata buatan	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata budaya
Wisata buatan	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata minat khusus
Wisata budaya	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata minat khusus

INFRASTRUKTUR

XII. Prioritas Jenis infrastruktur

Menurut Bapak/Ibu, jenis infrastruktur manakah yang menjadi prioritas dalam menentukan potensi pengembangan pariwisata di Kabupaten Jember.

Sarana transportasi	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Jaringan komunikasi
Sarana transportasi	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Penginapan& akomodasi
Sarana transportasi	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Jaringan air dan listrik
Jaringan komunikasi	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Penginapan& akomodasi
Jaringan komunikasi	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Jaringan air dan listrik
Penginapan&akomodasi	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Jaringan air dan listrik

XIII. Prioritas potensi wisata berdasarkan sarana transportasi

Menurut Bapak/Ibu, potensi wisata manakah yang menjadi prioritas pilihan sebagai potensi wisata yang tepat berdasarkan sarana transportasi.

Wisata alam	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata buatan
Wisata alam	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata budaya
Wisata alam	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata minat khusus

Wisata buatan	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata budaya
Wisata buatan	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata minat khusus
Wisata budaya	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata minat khusus

XIV. Prioritas potensi wisata berdasarkan jaringan komunikasi

Menurut Bapak/Ibu, potensi wisata manakah yang menjadi prioritas pilihan sebagai potensi wisata yang tepat berdasarkan jaringan komunikasi.

Wisata alam	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata buatan
Wisata alam	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata budaya
Wisata alam	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata minat khusus
Wisata buatan	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata budaya
Wisata buatan	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata minat khusus
Wisata budaya	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata minat khusus

XV. Prioritas potensi wisata berdasarkan penginapan dan akomodasi

Menurut Bapak/Ibu, potensi wisata manakah yang menjadi prioritas pilihan sebagai potensi wisata yang tepat berdasarkan penginapan dan akomodasi.

Wisata alam	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata buatan
Wisata alam	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata budaya
Wisata alam	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata minat khusus
Wisata buatan	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata budaya
Wisata buatan	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata minat khusus
Wisata budaya	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata minat khusus

XVI. Prioritas potensi wisata berdasarkan jaringan air dan listrik

Menurut Bapak/Ibu, potensi wisata manakah yang menjadi prioritas pilihan sebagai potensi wisata yang tepat berdasarkan jaringan air dan listrik.

Wisata alam	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata buatan
Wisata alam	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata budaya
Wisata alam	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata minat khusus
Wisata buatan	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata budaya
Wisata buatan	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata minat khusus
Wisata budaya	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata minat khusus

POTENSI WILAYAH

XVII. Prioritas Jenis Potensi wilayah

Menurut Bapak/Ibu, jenis potensi wilayah manakah yang menjadi prioritas dalam menentukan potensi pengembangan pariwisata di Kabupaten Jember.

SDA	9 7 5 3 1 3 5 7 9	SDM
SDA	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Kondisi sosial
SDA	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Kondisi budaya
SDM	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Kondisi sosial
SDM	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Kondisi budaya
Kondisi sosial	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Kondisi budaya

XVIII. Prioritas potensi wisata berdasarkan SDA

Menurut Bapak/Ibu, potensi wisata manakah yang menjadi prioritas pilihan sebagai potensi wisata yang tepat berdasarkan SDA.

Wisata alam	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata buatan
Wisata alam	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata budaya
Wisata alam	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata minat khusus
Wisata buatan	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata budaya

Wisata buatan	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata minat khusus
Wisata budaya	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata minat khusus

XIX. Prioritas potensi wisata berdasarkan SDM

Menurut Bapak/Ibu, potensi wisata manakah yang menjadi prioritas pilihan sebagai potensi wisata yang tepat berdasarkan SDM.

Wisata alam	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata buatan
Wisata alam	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata budaya
Wisata alam	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata minat khusus
Wisata buatan	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata budaya
Wisata buatan	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata minat khusus
Wisata budaya	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata minat khusus

XX. Prioritas potensi wisata berdasarkan kondisi sosial

Menurut Bapak/Ibu, potensi wisata manakah yang menjadi prioritas pilihan sebagai potensi wisata yang tepat berdasarkan kondisi sosial.

Wisata alam	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata buatan
Wisata alam	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata budaya
Wisata alam	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata minat khusus
Wisata buatan	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata budaya
Wisata buatan	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata minat khusus
Wisata budaya	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata minat khusus

XXI. Prioritas potensi wisata berdasarkan kondisi budaya

Menurut Bapak/Ibu, potensi wisata manakah yang menjadi prioritas pilihan sebagai potensi wisata yang tepat berdasarkan kondisi budaya.

Wisata alam	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata buatan
Wisata alam	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata budaya
Wisata alam	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata minat khusus

Wisata buatan	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata budaya
Wisata buatan	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata minat khusus
Wisata budaya	9 7 5 3 1 3 5 7 9	Wisata minat khusus

NAMA RESPONDEN	
JABATAN	
INSTANSI	
TANDA TANGAN	

Synthesis of Leaf Nodes with respect to GOAL

Distributive Mode

OVERALL INCONSISTENCY INDEX = 0.07

LEVEL 1	LEVEL 2	LEVEL 3	LEVEL 4	LEVEL 5
Ekonomi =.592				
	Kerja =.326			
		Alam =.173		
		Buatan =.069		
		Bdaya =.045		
		Khusus =.039		
	PAD =.185			
		Alam =.100		
		Khusus =.038		
		Buatan =.027		
		Bdaya =.020		
	Effect =.044			
		Alam =.023		
		Bdaya =.009		
		Khusus =.008		
		Buatan =.004		
	Nilai =.037			
		Alam =.019		
		Bdaya =.010		
		Buatan =.004		
		Khusus =.004		
Wilayah =.181				
	S D A =.106			
		Alam =.068		
		Bdaya =.023		
		Buatan =.009		
		Khusus =.006		
	S D M =.051			
		Alam =.028		
		Bdaya =.013		
		Buatan =.008		
		Khusus =.003		
	Sosial =.012			
		Alam =.007		
		Bdaya =.003		
		Buatan =.002		
		Khusus <.001		
	Budaya =.012			

Pengembangan Potensi Pariwisata

Digital Repository Universitas Jember

		Bdaya =.007	
		Alam =.003	
		Buatan <.001	
		Khusus <.001	
Struktur=.162			
	Trnsport=.081		
		Alam =.048	
		Buatan =.014	
		Khusus =.012	
		Bdaya =.007	
	Inap =.036		
		Alam =.023	
		Bdaya =.007	
		Buatan =.004	
		Khusus =.002	
	Kmnikasi=.027		
		Alam =.014	
		Bdaya =.007	
		Khusus =.003	
		Buatan =.003	
	Air =.018		
		Alam =.010	
		Bdaya =.004	
		Khusus =.002	
		Buatan =.001	
Lembaga =.065			
	Aman =.037		
		Alam =.018	
		Bdaya =.008	
		Khusus =.008	
		Buatan =.004	
	Hukum =.013		
		Alam =.008	
		Buatan =.002	
		Khusus =.002	
		Bdaya =.001	
	Trdsnal =.009		
		Bdaya =.005	
		Alam =.002	
		Buatan <.001	
		Khusus <.001	
	Regulasi=.007		
		Alam =.004	

